

# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**DINAS KESEHATAN**  
**KOTA TARAKAN**



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**

**DINAS KESEHATAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhana Wa' Taala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Transisi dan RPD Tahun 2025-2026.

Berdasarkan pada hasil evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025, melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.



Tarakan, Juli 2024

Kepala Dinas Kesehatan

dr. Devi Ika Indriarti., M.Kes  
Pembina Tk I

NIP.197005172002122006

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Singkatan .....	iii
Daftar Bagan .....	iv
Daftar Tabel .....	vi
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	4
C. Maksud dan Tujuan .....	7
D. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II</b>	
<b>HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA</b>	
<b>TARAKAN .....</b>	<b>9</b>
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan .....	9
B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan .....	15
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Tarakan .....	41
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	44
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	55
<b>BAB III</b>	
<b>TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN .....</b>	<b>56</b>
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	57
B. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Kaltara .....	59
C. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020- 2024 .....	60
D. Telaahan Rencana Strategis Dinkes Provinsi Kaltara 2016-2026 .....	63
E. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan ....	68

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN 70**

A. Program dan Kegiatan..... 70

**BAB V**

**PENUTUP .....81**

## DAFTAR SINGKATAN

1. Renja	: Rencana Kerja
2. OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
3. Renstra	: Rencana Strategis
4. RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
5. RKPD	: Rencana Kerja Pembangunan Daerah
6. APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
7. KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
8. PD	: Perangkat Daerah
9. PPAS	: Prioritas Platform Anggaran Sementara
10. RAPBD	: Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
11. SKPD	: Satuan Kinerja Perangkat Daerah
12. RKA	: Rencana Kerja Anggaran
13. BHP	: Bahan Habis Pakai
14. DAK	: Dana Alokasi Khusus
15. SK	: Surat Keputusan
16. AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
17. IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
18. FKTP	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
19. UPT	: Unit Pelaksana Teknis
20. BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
21. FKRTL	: Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
22. Musrembang	: Musyawarah Rencana Pembangunan
23. ASN	: Aparatur Sipil Negara
24. PK 5	: Pedagang Kaki Lima
25. Lansia	: Lanjut Usia
26. SPM	: Standar Pelayanan Minimal
27. ODGJ	: Orang Dengan Gangguan Jiwa
28. SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

## DAFTAR BAGAN

### DAFTAR DIAGRAM & GRAFIK

Gambar 1.1	: Bagan Alur Rancangan Renja Perangkat Daerah .....	3
Gambar 1.2	: Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah .....	4
Grafik.1	: Usia Harapan Hidup di Kota Tarakan Tahun 2019-2023....	14
Grafik.2	: Kasus Kematian Ibu Tahun 2019-2023.....	15
Grafik.3	: Kasus Kematian Bayi Tahun 2019-2023.....	16
Grafik. 4	: Kasus Kematian Balita Tahun 2019-2023.....	16
Grafik. 5	: Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 Kota Tarakan 2023 17	
Grafik. 6	: Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2023...17	
Grafik. 7	: Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2023.....	18
Grafik.8	: Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Tarakan 2023...19	
Grafik.9	: Persentase Anak Usia pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kota Tarakan 2023... 20	
Grafik.10	: Usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan Tarakan 2023.....	20
Grafik.11	: Cakupan Usia Lanjut yang mendapat Pelayanan Kesehatan 2023.....	21
Grafik.12	: Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kota Tarakan 2023.....	22
Grafik.13	: Persentase Penderita DM yang Mendapatkan yankes 2023	23
Grafik.14	: Persentase Penderita ODGJ Berat yang yankes Jiwa Sesuai Standar Tahun 2023.....	24
Grafik.15	: Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan yankes TBC 2023.....	25
Grafik.16	: Persentase dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar 2023 .....	25

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023 .....	10
Tabel 2.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan ....	33
Tabel 2.3	: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025 .....	44
Tabel 3.1	: Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2025.....	56
Tabel 3.2	: Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025.....	68
Tabel 4.1	: Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025 .....	71

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sebagai Salah Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kota Tarakan merupakan Instansi Pelaksana yang melakukan kegiatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan. Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Renja merupakan dokumen perencanaan OPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda Litbang dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan sehingga dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan

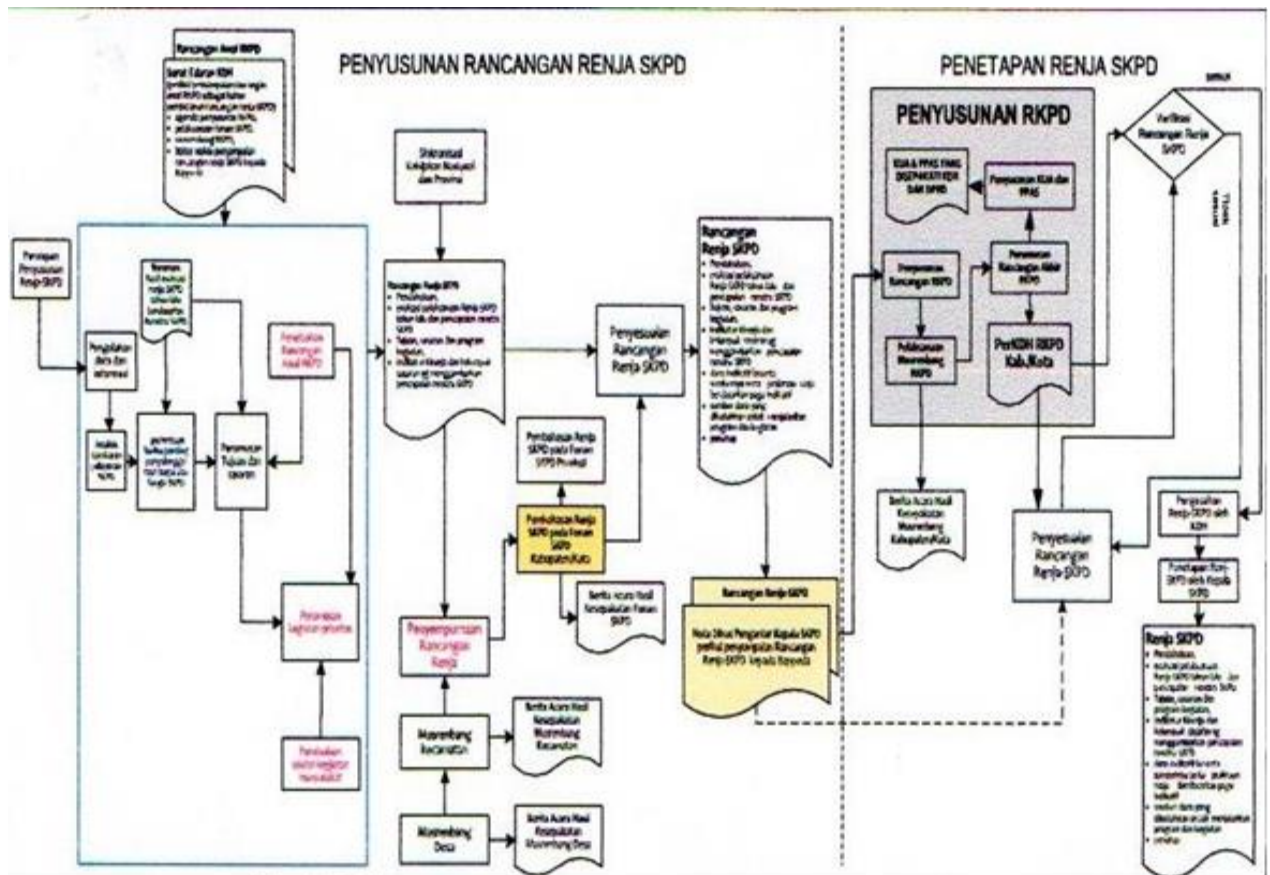


penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja Tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada uraian di atas, serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tarakan 2025.

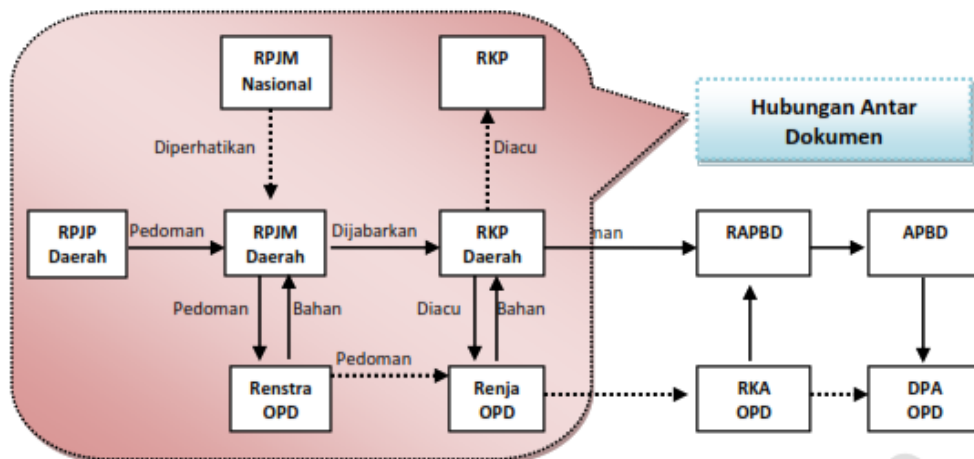
Renja OPD disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu dari perencanaan tingkat puskesmas ke tingkat OPD Dinas Kesehatan.
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab PD.
4. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan. Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan Renja Dinas Kesehatan disusun dengan sistematika:
  - I. Pendahuluan
  - II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan
  - III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
  - IV. Rencana kerja dan pendanaan
  - V. Penutup



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja Perangkat Daerah

Renja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen- dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

## B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tarakan adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Surat Edaran 906 / 2114/SJ Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja Atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan
24. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 52 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Wali kota nomor 64 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
25. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025- 2026
26. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.
27. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-II/146/2024 Tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini untuk memantapkan kinerja Dinas Kesehatan lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (*Good Government*) dengan penyelenggaraan seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025 ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025;
2. Untuk menterjemahkan Perencanaan Strategis Dua Tahunan yang dituangkan dalam Perubahan Renstra SKPD ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Kesehatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai visi dan misi RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026.
2. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2025;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana program dan Kegiatan
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2025.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan, analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Tarakan, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN**

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator kinerja, tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

##### **BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN**

Bab ini memuat rancangan rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025

##### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN**

#### **RENJA SEMESTER 1**

##### **A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kesehatan, serta hambatan permasalahan yang dihadapi

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kesehatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan melaksanakan 5 (Lima) Program dan 22 (Dua Puluh Dua) kegiatan dan 70 (Tujuh Puluh) Sub kegiatan ada dengan alokasi dana sebesar Rp.175.107.082.633,- dengan realisasi fisik 90,38 % dan realisasi keuangan 88,18%.

Program dan kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2023 semester 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Akhir Dinas Kesehatan Tahun 2023**

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah																								
Kota Tarakan																								
Tahun 2023																								
Sasaran Pembangunan Tahunan :																								
1.																								
2.																								
3.																								
4.																								
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub-output)				Target Akhir Renstra Tahun RPJM/Renstra (2021-2026)		Target Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	3				4	5				6		8		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 * 100) %		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 6 * 100) %		17		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)			
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita	0 / 1.000 KH	Rp	0	6 / 1.000 KH	Rp	0		Rp	21.033.318.706,88		0,00 %		Rp	21.033.318.706,88		0,00 %	Dinas Kesehatan	
						Angka Kematian Bayi	0 / 1.000 KH	Rp	0	6 / 1.000 KH	Rp	0					0,00 %							
						Angka Kematian Ibu Melahirkan	0 / 100.000 KH	Rp	0	42 / 100.000 KH	Rp	0					0,00 %							
						Pelayanan kesehatan balita	0 %	Rp	0	100 %	Rp	0					0,00 %							
						Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	0 %	Rp	0	100 %	Rp	0					0,00 %							
						Pelayanan kesehatan ibu hamil	0 %	Rp	0	100 %	Rp	0					0,00 %							
						Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	0 %	Rp	0	100 %	Rp	0					0,00 %							
						Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	0 %	Rp	0	100 %	Rp	0					0,00 %							
						Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV)	0 %	Rp	0	100 %	Rp	0					0,00 %							
						Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis	0 %	Rp	0	100 %	Rp	0					0,00 %							
						Pelayanan kesehatan pada usia lansia	0 %	Rp	0	100 %	Rp	0					0,00 %							
						Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	0 %	Rp	0	100 %	Rp	0					0,00 %							
						Pelayanan kesehatan pada usia produktif	0 %	Rp	0	100 %	Rp	0					0,00 %							
						Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	0 %	Rp	0	100 %	Rp	0					0,00 %							
						Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	0 %	Rp	0	100 %	Rp	0					0,00 %							
						Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi	0 %	Rp	0	60 %	Rp	0					0,00 %							
						Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM	0 Persen	Rp	0	100 Persen	Rp	0					0,00 %							
						Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan	0 %	Rp	0	100 %	Rp	0					0,00 %							
						Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	0 %	Rp	0	7 %	Rp	0					0,00 %							
						Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	0 Persen	Rp	0	0 Persen	Rp	0					0,00 %							
						Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM	100 %	Rp	0	100 %	Rp	0					0,00 %							
						Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM	0 %	Rp	0	0 %	Rp	0					0,00 %							
						Rujukan																		
						Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	0 %	Rp	0	0 %	Rp	0					0,00 %							
	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																			
1	1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	Rp	0	1 Unit	Rp	500.000.000,00	0 Unit	Rp	0	0,00 %	0,00 %	0 Unit	Rp	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
2	1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	Rp	0	2 Unit	Rp	500.000.000,00	0 Unit	Rp	0	0,00 %	0,00 %	0 Unit	Rp	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
3	1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	Rp	0	1 Unit	Rp	750.000.000,00	0 Unit	Rp	0	0,00 %	0,00 %	0 Unit	Rp	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
4	1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	63 Unit	Rp	180.000.000	63 Unit	Rp	280.000.000	1 Unit	Rp	180.000.000	1,59 %	64,29 %	1 Unit	Rp	180.000.000,00	1,59 %	100,00 %	Dinas Kesehatan

5	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Rp	0	1 Unit	Rp	450.000.000	3 Unit	Rp	5.325.000	300,00 %	1,18 %	3 Unit	Rp	5.325.000,00	300,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
6	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit	Rp	1.831.537.400	7 Unit	Rp	2.706.812.259	9 Unit	Rp	1.869.747.585	128,57 %	69,08 %	9 Unit	Rp	1.869.747.585,00	128,57 %	102,09 %	Dinas Kesehatan
7	1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uj dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	7 Unit	Rp	0	7 Unit	Rp	1.089.603.500	0 Unit	Rp	0	0,00 %	0,00 %	0 Unit	Rp	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
8	1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	Rp	500.000.000	1 Paket	Rp	705.600.000	1 Paket	Rp	422.970.075	100,00 %	59,94 %	1 Paket	Rp	422.970.075,00	100,00 %	84,59 %	Dinas Kesehatan
9	1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	Rp	1.473.425.600	1 Paket	Rp	3.350.000.000	1 Paket	Rp	309.498.399	100,00 %	9,24 %	1 Paket	Rp	309.498.399,00	100,00 %	21,01 %	Dinas Kesehatan
10	1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Paket	Rp	40.000.000	3 Paket	Rp	40.000.000	3 Paket	Rp	34.995.400	100,00 %	87,49 %	3 Paket	Rp	34.995.400,00	100,00 %	87,49 %	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
11	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4904 Orang	Rp	298.780.064	4904 Orang	Rp	301.700.609	3286 Orang	Rp	252.370.250	67,01 %	83,65 %	3286 Orang	Rp	252.370.250,00	67,01 %	84,47 %	Dinas Kesehatan
12	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4786 Orang	Rp	70.800.000	4786 Orang	Rp	181.820.000	3125 Orang	Rp	51.682.500	65,29 %	28,43 %	3125 Orang	Rp	51.682.500,00	65,29 %	73,00 %	Dinas Kesehatan
13	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4640 Orang	Rp	100.200.000	4640 Orang	Rp	166.700.000	3104 Orang	Rp	61.310.185	66,90 %	36,78 %	3104 Orang	Rp	61.310.184,80	66,90 %	61,19 %	Dinas Kesehatan
14	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7740 Orang	Rp	311.559.660	7740 Orang	Rp	213.620.000	6509 Orang	Rp	216.541.660	84,10 %	101,37 %	6509 Orang	Rp	216.541.660,00	84,10 %	69,50 %	Dinas Kesehatan
15	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36446 Orang	Rp	332.600.000	36446 Orang	Rp	174.450.000	14281 Orang	Rp	292.580.000	39,18 %	167,72 %	14281 Orang	Rp	292.580.000,00	39,18 %	87,97 %	Dinas Kesehatan
16	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60000 Orang	Rp	55.448.500	60000 Orang	Rp	149.413.840	30656 Orang	Rp	29.717.500	51,09 %	19,89 %	30656 Orang	Rp	29.717.500,00	51,09 %	53,59 %	Dinas Kesehatan
17	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2632 Orang	Rp	106.094.920	2632 Orang	Rp	75.520.000	4673 Orang	Rp	70.130.280	177,55 %	92,86 %	4673 Orang	Rp	70.130.280,00	177,55 %	66,10 %	Dinas Kesehatan
18	1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26426 Orang	Rp	34.999.980	26426 Orang	Rp	277.600.000	8535 Orang	Rp	18.589.000	32,30 %	6,70 %	8535 Orang	Rp	18.589.000,00	32,30 %	53,11 %	Dinas Kesehatan
19	1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5139 Orang	Rp	293.442.740	5139 Orang	Rp	277.600.000	3838 Orang	Rp	201.064.480	74,68 %	72,43 %	3838 Orang	Rp	201.064.480,00	74,68 %	68,52 %	Dinas Kesehatan
20	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	305 Orang	Rp	36.699.900	305 Orang	Rp	72.350.000	329 Orang	Rp	33.181.500	107,87 %	45,86 %	329 Orang	Rp	33.181.500,00	107,87 %	90,41 %	Dinas Kesehatan
21	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5826 Orang	Rp	2.153.412.000	5826 Orang	Rp	124.430.000	4910 Orang	Rp	31.650.000	84,28 %	25,44 %	4910 Orang	Rp	31.650.000,00	84,28 %	1,47 %	Dinas Kesehatan
22	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6328 Orang	Rp	184.032.200	6328 Orang	Rp	282.475.035	4951 Orang	Rp	123.370.000	78,24 %	43,67 %	4951 Orang	Rp	123.370.000,00	78,24 %	67,04 %	Dinas Kesehatan
23	1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	6 Dokumen	Rp	299.283.680	6 Dokumen	Rp	659.010.260	3 Dokumen	Rp	30.183.400	50,00 %	4,58 %	3 Dokumen	Rp	30.183.400,00	50,00 %	10,09 %	Dinas Kesehatan
24	1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	Rp	2.100.000	1 Dokumen	Rp	2.100.000,00	0 Dokumen	Rp	0	0,00 %	0,00 %	0 Dokumen	Rp	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
25	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9 Dokumen	Rp	2.765.246.570	9 Dokumen	Rp	100.075.000	6 Dokumen	Rp	489.084.440	66,67 %	488,72 %	6 Dokumen	Rp	489.084.440,00	66,67 %	17,69 %	Dinas Kesehatan
26	1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	Rp	158.707.990	2 Dokumen	Rp	114.380.880	2 Dokumen	Rp	92.910.000	100,00 %	81,23 %	2 Dokumen	Rp	92.910.000	100,00 %	58,54 %	Dinas Kesehatan
27	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	Rp	1.039.342.670	3 Dokumen	Rp	266.120.000	3 Dokumen	Rp	845.110.200	100,00 %	317,57 %	3 Dokumen	Rp	845.110.200	100,00 %	81,31 %	Dinas Kesehatan
28	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 Dokumen	Rp	293.580.820	7 Dokumen	Rp	379.829.251	6 Dokumen	Rp	193.398.690	85,71 %	50,92 %	6 Dokumen	Rp	193.398.690	85,71 %	65,88 %	Dinas Kesehatan
29	1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	Rp	250.263.700	4 Dokumen	Rp	154.034.965	3 Dokumen	Rp	81.400.000	75,00 %	52,85 %	3 Dokumen	Rp	81.400.000	75,00 %	32,53 %	Dinas Kesehatan
30	1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 orang	Rp	23.956.000	305 orang	Rp	23.956.000	426 orang	Rp	23.900.000	139,67 %	99,77 %	426 orang	Rp	23.900.000	0,00 %	99,77 %	Dinas Kesehatan
31	1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 orang	Rp	3.750.000	1 orang	Rp	3.750.000	1 orang	Rp	2.950.000	100,00 %	78,67 %	1 orang	Rp	2.950.000	0,00 %	78,67 %	Dinas Kesehatan
32	1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	Rp	0	1 Dokumen	Rp	12.000.000	0 Dokumen	Rp	0	0,00 %	0,00 %	0 Dokumen	Rp	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
33	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9 Dokumen	Rp	1.238.511.735	9 Dokumen	Rp	695.865.000	7 Dokumen	Rp	783.087.970	77,78 %	112,53 %	7 Dokumen	Rp	783.087.970	77,78 %	63,23 %	Dinas Kesehatan
34	1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	Rp	12.418.974.200	4 Dokumen	Rp	10.724.688.320	2 Dokumen	Rp	12.135.954.209	50,00 %	113,16 %	2 Dokumen	Rp	12.135.954.209	50,00 %	97,72 %	Dinas Kesehatan
35	1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	400 Orang	Rp	0	400 Orang	Rp	10.000.000	0 Orang	Rp	0	0,00 %	0,00 %	0 Orang	Rp	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan

36	1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 paket	Rp	2.950.000	1 paket	Rp	50.000.000	1 paket	Rp	1.650.000	100,00 %	3,30 %	1 paket	Rp	1.650.000	100,00 %	55,93 %	Dinas Kesehatan
37	1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen	Rp	15.000.000	2 Dokumen	Rp	25.080.480	0 Dokumen	Rp	0	0,00 %	0,00 %	0 Dokumen	Rp	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
38	1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	6 Unit	Rp	100.000.000	6 Unit	Rp	100.000.000	4 Unit	Rp	104.609.000	66,67 %	104,61 %	4 Unit	Rp	104.609.000	66,67 %	104,61 %	Dinas Kesehatan
39	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	6 Dokumen	Rp	1.784.161.996	6 Dokumen	Rp	441.200.000	6 Dokumen	Rp	800.087.705	100,00 %	181,34 %	6 Dokumen	Rp	800.087.705	100,00 %	44,84 %	Dinas Kesehatan
40	1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	Rp	632.591.670	3 Dokumen	Rp	632.591.670	3 Dokumen	Rp	582.781.428	100,00 %	92,13 %	3 Dokumen	Rp	582.781.428	100,00 %	92,13 %	Dinas Kesehatan
41	1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	6 Unit	Rp	330.266.240	6 Unit	Rp	163.956.600	6 Unit	Rp	397.060.372	100,00 %	242,17 %	6 Unit	Rp	397.060.372	100,00 %	120,22 %	Dinas Kesehatan
42	1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Rp	5.500.000	1 Laporan	Rp	4.500.000	1 Laporan	Rp	100.000	100,00 %	2,22 %	1 Laporan	Rp	100.000	100,00 %	1,82 %	Dinas Kesehatan
43	1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100 Keluarga	Rp	24.992.660	100 Keluarga	Rp	65.000.000	274 Keluarga	Rp	11.200.000	274,00 %	17,23 %	274 Keluarga	Rp	11.200.000	274,00 %	44,81 %	Dinas Kesehatan
44	1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1079 Orang	Rp	40.506.200	1079 Orang	Rp	49.531.200	535 Orang	Rp	12.684.500	49,58 %	25,61 %	535 Orang	Rp	12.684.500	49,58 %	31,31 %	Dinas Kesehatan
45	1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56 Orang	Rp	17.500.000	56 Orang	Rp	17.500.000	71 Orang	Rp	2.400.000	126,79 %	13,71 %	71 Orang	Rp	2.400.000	126,79 %	13,71 %	Dinas Kesehatan
46	1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2545 Orang	Rp	122.198.455	25450 Orang	Rp	111.998.455	912 Orang	Rp	1.300.000	3,58 %	1,16 %	912 Orang	Rp	1.300.000	35,83 %	1,06 %	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																		
47	1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	6 Dokumen	Rp	0	6 Dokumen	Rp	100.000.000	0 Dokumen	Rp	0	0,00 %	0,00 %	0 Dokumen	Rp	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
48	1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	Rp	0	2 Dokumen	Rp	120.000.000	0 Dokumen	Rp	0	0,00 %	0,00 %	0 Dokumen	Rp	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Keles C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
49	1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	2 Unit	Rp	283.262.000	7 Unit	Rp	177.130.000	3 Unit	Rp	236.742.979	42,86 %	133,65 %	3 Unit	Rp	236.742.979	150,00 %	83,58 %	Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%)																	72,79	65,98			70,75	48,39		
Predikat kinerja																	S	S			S	SR		
	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	0 Persen	Rp	0	0 Persen	Rp	0		Rp	507.860.750	0,00 %			Rp	507.860.750	0,00 %		Dinas Kesehatan
							Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	0 %	Rp	0	100 %	Rp	0				0,00 %					0,00 %		
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																		
50	1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	70 Orang	Rp	0	70 Orang	Rp	777.600.000	0 Orang	Rp	0	0,00 %	0,00 %	0 Orang	Rp	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
51	1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Rp	34.868.000	1 Dokumen	Rp	34.868.000	1 Dokumen	Rp	20.980.000	100,00 %	60,17 %	1 Dokumen	Rp	20.980.000	100,00 %	60,17 %	Dinas Kesehatan
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
52	1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 Orang	Rp	763.587.410	30 Orang	Rp	339.747.293	30 Orang	Rp	486.880.750	100,00 %	143,31 %	30 Orang	Rp	486.880.750	100,00 %	63,76 %	Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%)																	66,67	67,83			66,67	41,31		
Predikat kinerja																	S	S			S	SR		

	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan	0 Persen	Rp	0	100 Persen	Rp	0		Rp	199.118.180		0,00 %		Rp	199.118.180,00		0,00 %	Dinas Kesehatan
							Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan	100 %	Rp	0	0 %	Rp	0					0,00 %					0,00 %	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
53	1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25 Sarana	Rp	101.725.580	25 Sarana	Rp	101.725.580	29 Sarana	Rp	85.210.260	116,00 %	83,76 %	29 Sarana	Rp	85.210.260	116,00 %	83,76 %	Dinas Kesehatan
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
54	1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Dokumen	Rp	150.267.590	23 Dokumen	Rp	150.267.590	11 Dokumen	Rp	60.928.150	47,83 %	40,55 %	11 Dokumen	Rp	60.928.150	11,00 %	40,55 %	Dinas Kesehatan
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga																		
55	1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	2 Unit	Rp	154.760.170	2 Unit	Rp	15.400.000	2 Unit	Rp	52.979.770	100,00 %	344,02 %	2 Unit	Rp	52.979.770	100,00 %	34,23 %	Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%)																87,94	156,11			75,67	52,85			
Predikat kinerja																T	UNK			T	R			
	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam bidang kesehatan	0 Persen	Rp	0	0 Persen	Rp	0		Rp	1.771.715.000		0,00 %		Rp	1.771.715.000		0,00 %	Dinas Kesehatan
							Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	100 %	Rp	0	0 %	Rp	0					0,00 %					0,00 %	
							Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	0 Persen	Rp	0	100 Persen	Rp	0					0,00 %					0,00 %	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
56	1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Rp	1.726.382.660	1 Dokumen	Rp	1.660.830.000	1 Dokumen	Rp	1.635.600.000	100,00 %	98,48 %	1 Dokumen	Rp	1.635.600.000	100,00 %	94,74 %	Dinas Kesehatan
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
57	1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Rp	47.900.000	1 Dokumen	Rp	47.904.000	1 Dokumen	Rp	35.880.000	100,00 %	74,90 %	1 Dokumen	Rp	35.880.000	100,00 %	74,91 %	Dinas Kesehatan
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
58	1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	Rp	477.595.810,00	3 Dokumen	Rp	16.820.000	3 Dokumen	Rp	100.235.000	100,00 %	595,93 %	3 Dokumen	Rp	100.235.000	100,00 %	20,99 %	Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	256,44			100,00	63,54			
Predikat kinerja																ST	UNK			ST	R			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya:																								

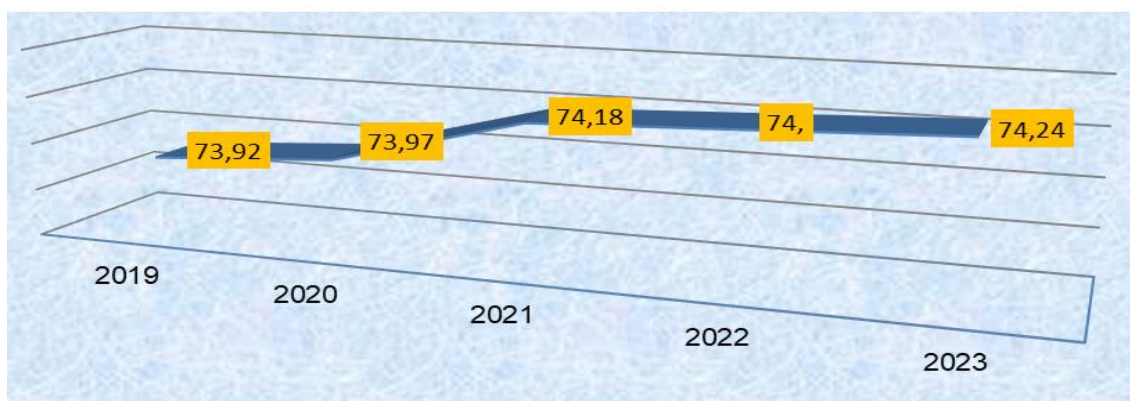
## B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN DAN RSUD KOTA TARAKAN

Tugas Dinas Kesehatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan Program operasional dan kegiatan -kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerjasama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait. Keberhasilan program Dinas Kesehatan Kota Tarakan sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kota Tarakan yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas.

Selama tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Tarakan telah melakukan berbagai program kegiatan sebagai realisasi terhadap pembangunan kesehatan dengan koordinasi program secara internal di lingkungan dinas kesehatan dan puskesmas maupun lintas sektor dengan instansi lain dan masyarakat. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat sebagai salah satu hasil pembangunan adalah situasi derajat kesehatan yang meliputi derajat kesehatan, perilaku masyarakat, kesehatan lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu derajat kesehatan merupakan indikator penilaian hasil pelaksanaan program kesehatan yang dijalankan. Berikut uraian dari situasi pembangunan kesehatan yang dicapai melalui indikator-indikator kesehatan yang ada.

### 1. USIA HARAPAN HIDUP

**Grafik 1. Usia Harapan Hidup di Kota Tarakan Tahun 2019- 2023**

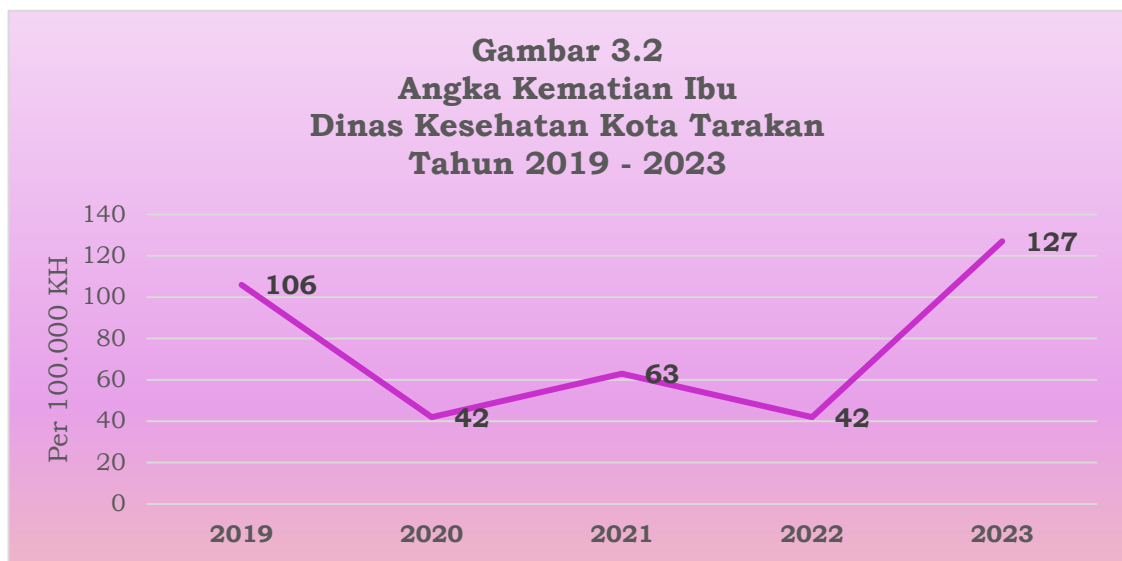


Sumber: BPS (Kota Tarakan dalam Angka), 2024

Berdasarkan grafik 2. Usia harapan hidup (UHH) Kota Tarakan tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, adapun usia harapan hidup (UHH) Kota Tarakan Tahun 2023 sebesar 74,24 masih di atas dari capaian Usia Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Utara sebesar 72,88% dan Capaian Usia Harapan Hidup tingkat Nasional sebesar 74,39%.

## 2. Angka Kematian Ibu

**Grafik 2. Angka Kematian Ibu Tahun 2019-2023**

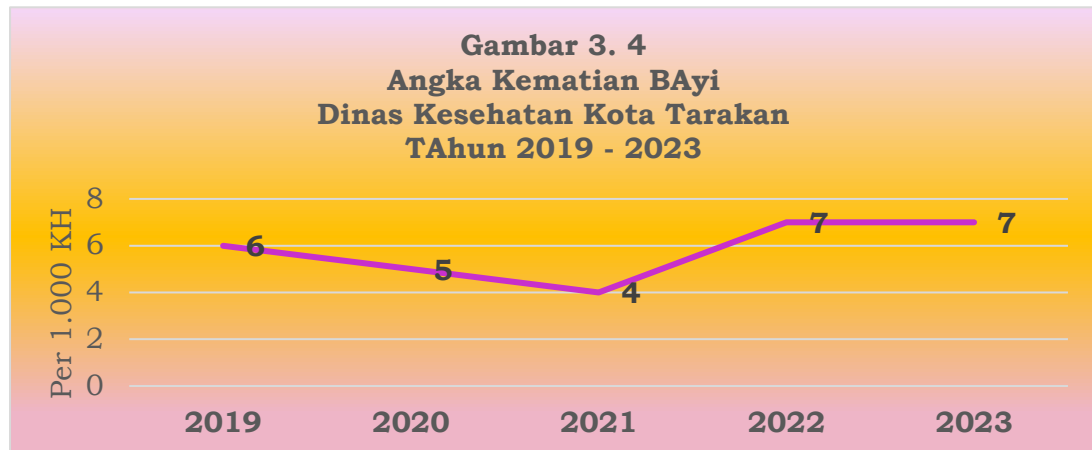


*Sumber : Laporan Profil Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat, 2023*

Angka kematian ibu tahun 2023 capaiannya 127 per 100.000 Kelahiran Hidup angka ini masih dibawah target nasional kementerian Kesehatan sebesar 194 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian tahun 2022 42 per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini merupakan indikator negative, dimana semakin rendah angka capaian kematian Ibu semakin baik. Jumlah kasus kematian ibu tahun 2023 ada 6 kasus dimana 2 kasus disebabkan oleh perdarahan, 1 kasus hipertensi, 1 kasus kelainan jantung dan pembuluh darah, 1 kasus Diabetes militus dan 1 kasus karna Hiperemesis.

### 3. Angka Kematian Bayi

**Grafik 3. Angka Kematian Bayi Tahun 2019-2023**



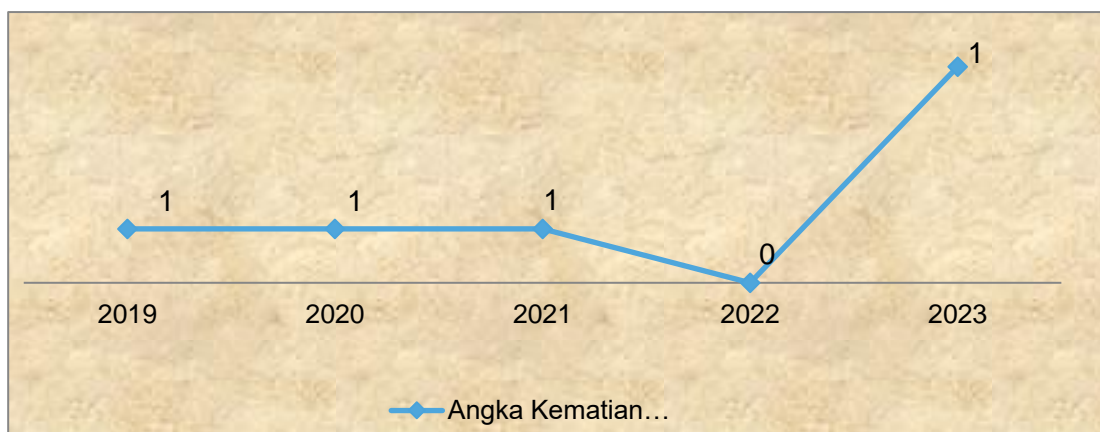
*sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat, 2023*

Grafik. 3 menunjukkan Angka Kematian Bayi pada tahun 2023 7 per 1000 Kelahiran Hidup dimana ada 32 kasus dari 4.731 Kelahiran Hidup kematian bayi mengalami kenaikan dibanding kematian bayi di tahun 2022 sebanyak kasus dengan angka kematian 7 per 1000 kelahiran hidup. Capaian Angka Kematian Bayi Tahun 2022 7 per 1000 kelahiran hidup masih di bawah target Nasional (Kemenkes) yaitu 18.6 per 1000 kelahiran hidup. Kasus kematian bayi tahun 2023 terbanyak pada kasus BBLR 15 kasus, asfiksia 11, infeksi 1, Aspirasi 3, dan Diare 2. Dimana 30 kasus kematian neonatal dan 2 kasus kematian Post neonatal.

### 4. Angka Kematian Balita (AKABA)

**Grafik 4. Angka Kematian Balita Tahun 2019-2023**

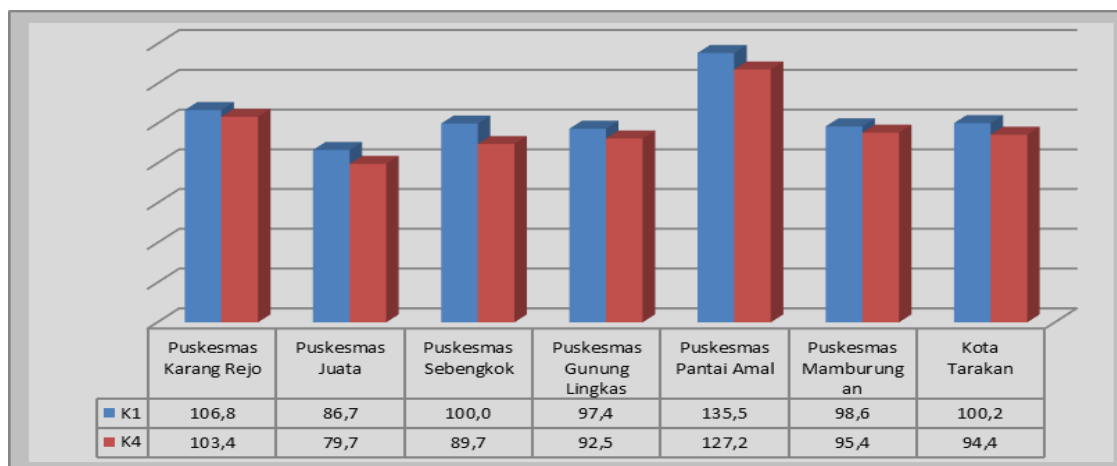
Grafik 4. Menunjukkan angka kematian balita pada tahun 2023 1/1000 KH (4 kasus akibat Diare).



*sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat, 2023*

## 5. Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4

**Grafik 5. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 di Kota Tarakan Tahun 2023**

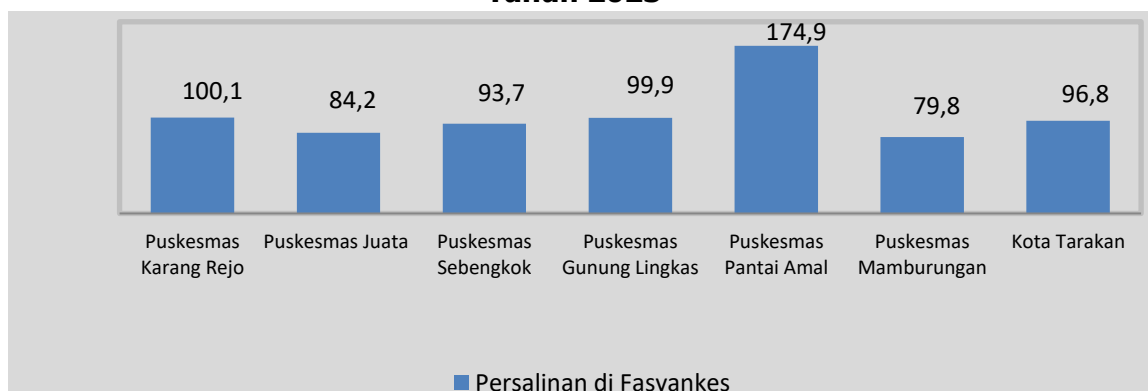


*Sumber :Laporan Profil Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat, 2023*

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat cakupan jumlah Kunjungan K1 pada tahun 2023 tertinggi di Puskesmas Pantai Amal sebesar 135,5% dan terendah di Puskesmas Juata 86,7%. Untuk cakupan kunjungan K4 tertinggi di Puskesmas Pantai Amal yaitu sebesar 127,2% dan cakupan terendah di Puskesmas Juata yaitu sebesar 79,7%. Cakupan kunjungan K1 Kota Tarakan yaitu 100,2% dan cakupan kunjungan K4 Kota Tarakan yaitu 94,4%. Untuk Capaian K1 sebesar 100,2% dimana puskesmas yang tertinggi capaiannya yaitu puskesmas Pantai Amal 135,5% hal ini disebabkan karena sasaran (target) riil ibu hamil lebih tinggi dari sasaran estimasi dimana penduduk yang sudah berdomisili enam bulan walaupun bukan warga kelurahan pantai amal tetap di layani padahal ada beberapa ibu hamil yang pendatang (warga luar Tarakan).

## 6. Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

**Grafik 6. Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2023**



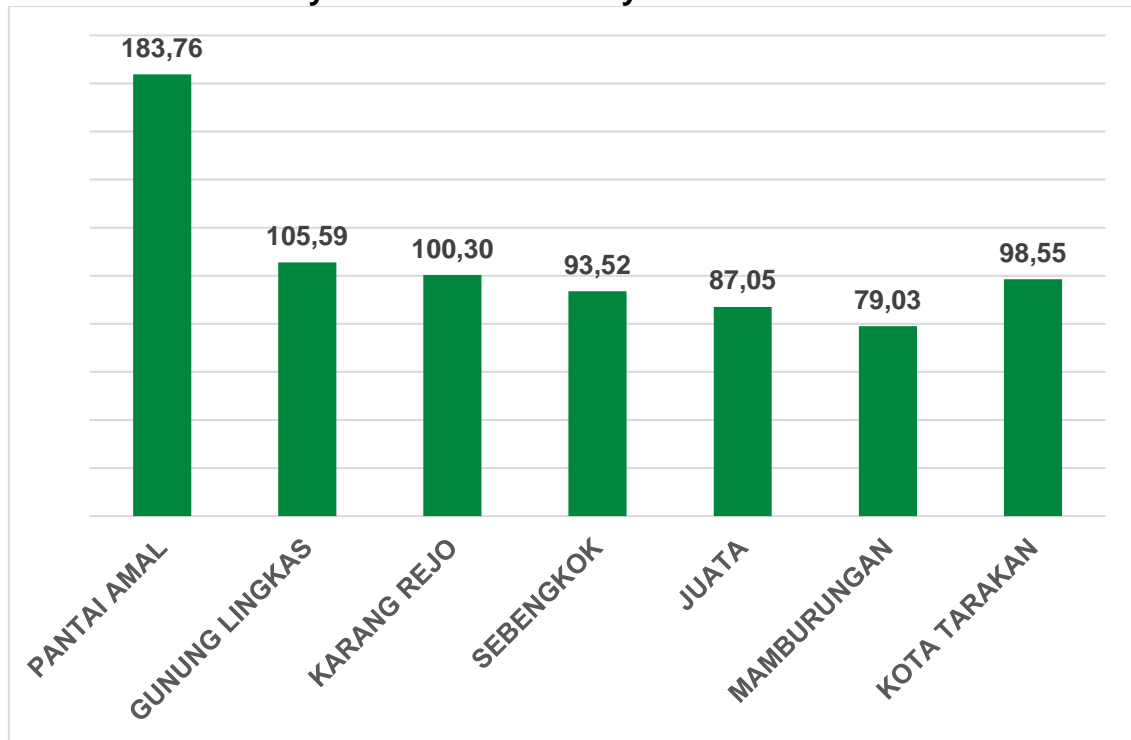
*Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat, 2023*



Persentase persalinan di Fasyankesi Kota Tarakan tahun 2023 sebesar 96,8%. Puskesmas dengan persentase tertinggi yaitu Puskesmas Pantai Amal sebesar 174,9% dikarenakan capaian melebihi target sedangkan yang terendah berada di Puskesmas Mamburungan dengan capaian 79,8%. dimana capaian puskesmas yang tertinggi yaitu puskesmas Pantai Amal 174,9% hal ini di sebabkan karna sasaran (target ) riil ibu bersalin lebih tinggi dari sasaran estimasi dimana penduduk yang sudah berdomisili enam bulan walaupun bukan warga kelurahan pantai amal tetap di layani padahal ada beberapa ibu hamil yang pendatang ( warga luar Tarakan).

## 7. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

**Grafik 7. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2023**



*Sumber : Laporan Profil Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat, 2023*

Berdasarkan Grafik 7, pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2023 (98,55%) Tertinggi pada puskesmas Pantai Amal (183,76%) dan Terendah pada Puskesmas Mamburungan (79,03%). Hal ini di sebabkan karna sasaran (target ) riil bayi lebih tinggi dari sasaran estimasi dimana penduduk yang sudah berdomisili enam bulan walaupun bukan warga kelurahan pantai amal tetap di layani padahal pendatang ( warga luar Tarakan).

## 8. Pelayanan Kesehatan Balita

**Grafik 8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Tarakan Tahun 2023**



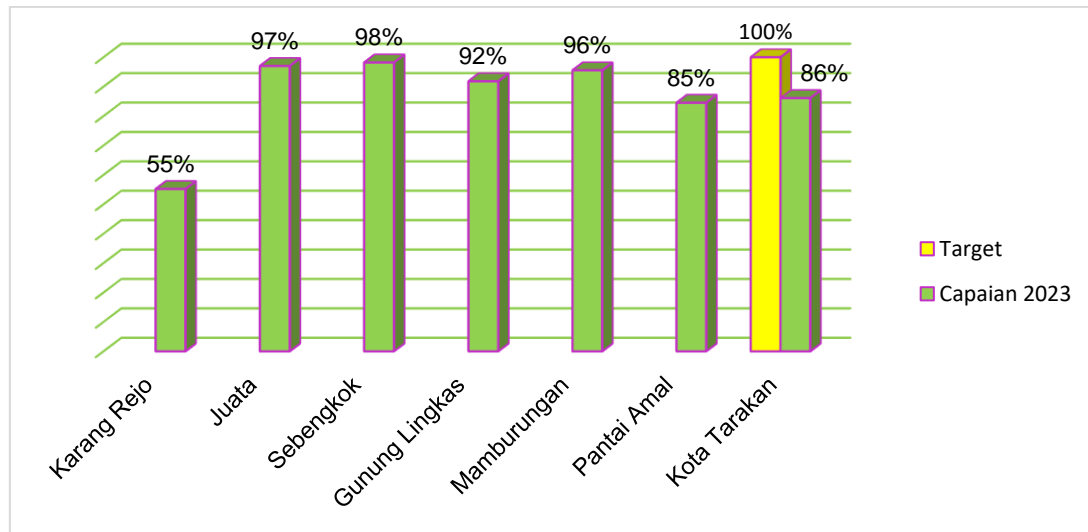
*Sumber : Laporan Profil Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat 2023*

Pada grafik 8 diatas yang dimaksud target adalah jumlah balita per wilayah puskesmas dan capaian adalah jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan (51,07%) masih jauh dari target 100% hal ini disebabkan adanya balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar harus memenuhi 8 kriteria, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tidak termasuk cakupan balita sesuai standar Puskesmas dengan capaian tertinggi adalah Puskesmas Pantai Amal sebesar Balita 5.540 (69,50%) dan capaian terendah adalah Puskesmas Gunung Lingkas sebesar 3.908 Balita (23,52%).

## 9. Penjaringan Anak Sekolah

Penjaringan adalah salah satu kegiatan utama Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang sasarannya merupakan siswa-siswi kelas 1, 7 dan 10 dan setingkat. Pelaksanaan penjaringan meliputi seluruh sekolah di masing-masing wilayah puskesmas dengan melibatkan beberapa petugas puskesmas di antaranya dokter, perawat, dan penyuluh kesehatan.

**Grafik. 9 Persentase Anak Usia pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kota Tarakan Tahun 2023**



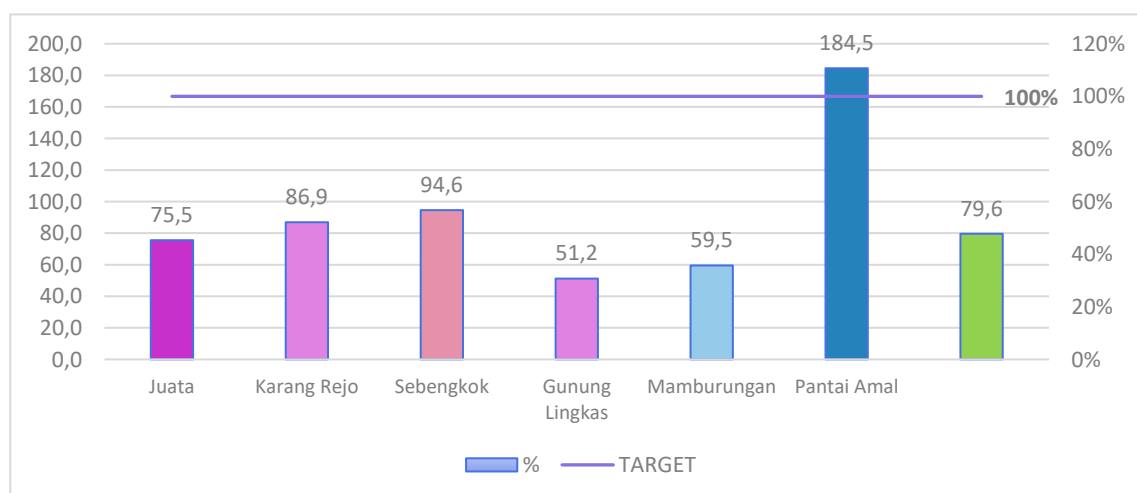
*Sumber : Laporan LPPD Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan, 2023*

Secara umum cakupan pelayanan pendidikan dasar di Kota Tarakan tahun 2023 86% masih di bawah target 100%. Capaian persentase yang tertinggi pada puskesmas Juata 97% dan terendah pada puskesmas Karang Rejo 55% . Pada saat pelaksanaan penjangkaran ada beberapa siswa berhenti sekolah , tidak masuk sekolah tanpa keterangan.

## 10. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Upaya ini dilakukan melalui pelayanan kesehatan usia produktif (usia 15-59 tahun) yang berupa skrining kesehatan. Jumlah penduduk usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 10. Cakupan Usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023**

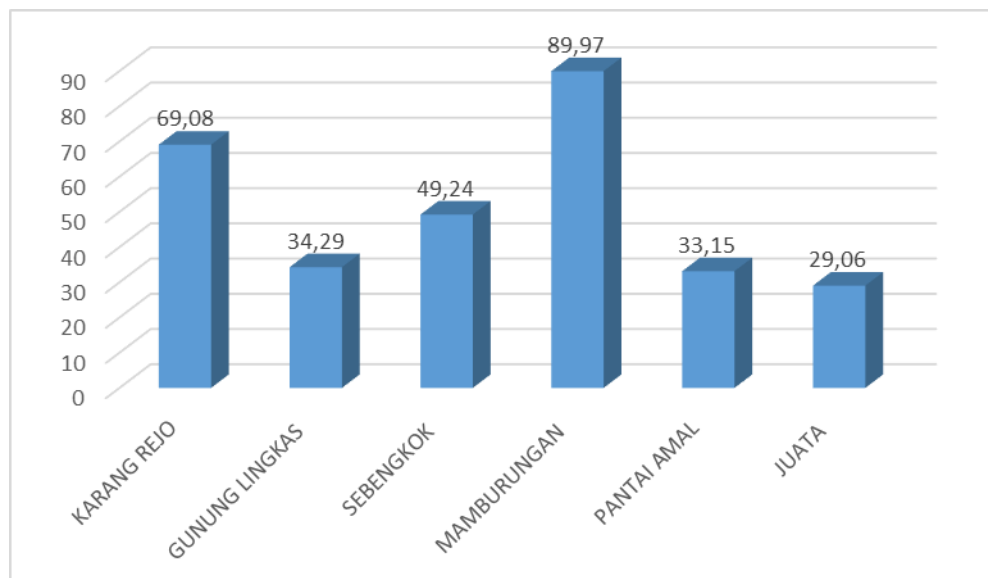


*Sumber : : laporan bulanan SPM puskesmas se Kota Tarakan tahun 2023*

Berdasarkan Grafik 10 di atas dapat dilihat persentase usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan di Kota Tarakan Tahun 2023 sebesar 79,6 % tertinggi pada Puskesmas Pantai Amal (184,5%) dan terendah pada Puskesmas Gunung Lingkas (51,2%). Penetapan sasaran yang tinggi karena masih ada perbedaan persepsi dalam menetapkan target sasaran dan Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melakukan pemeriksaan deteksi dini minimal 1 tahun sekali.

## **11. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut**

**Grafik 11. Cakupan Usia Lanjut yang mendapat Pelayanan Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023**



*Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat, 2023*

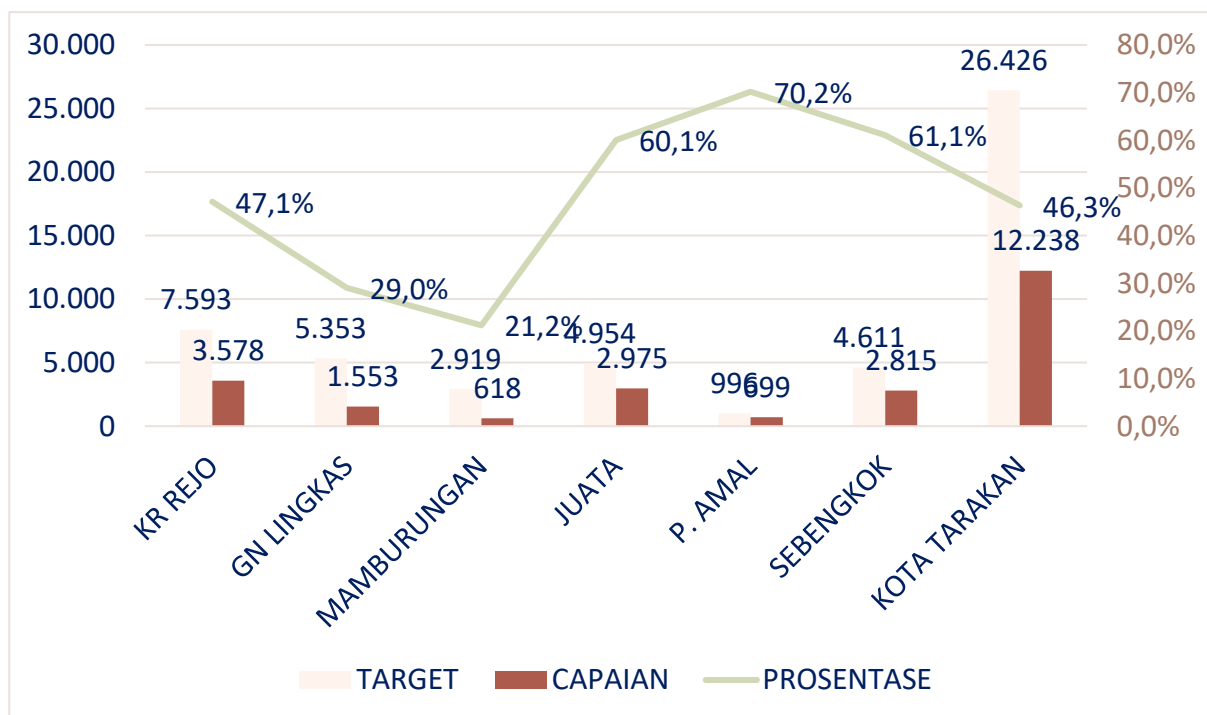
Berdasarkan grafik 11 dapat diketahui bahwa capaian tertinggi di Puskesmas Mamburungan sebesar 89,97%. Capaian pelayanan lansia terendah ada di wilayah puskesmas Juata. Pelaksanaan pelayanan lansia hanya mencakup pelayanan lansia di puskesmas dan belum memasukkan data pelayanan lansia di Rumah Sakit dan layanan swasta lainnya. Pelaksanaan pelayanan lansia di puskesmas dilakukan didalam Gedung dan luar Gedung saat posyandu lansia. Kendala utama yang dihadapi adalah petugas pengelola lansia banyak yang baru dan belum pernah mendapatkan peningkatan kapasitas pelaksanaan program Lansia. Upaya peningkatan kapasitas

petugas pelayanan lansia dan koordinasi jejaring lintas sektor dengan layanan rujukan (Rumah Sakit ) dan faskes swasta lainnya akan mulai dilaksanakan di tahun 2024

## 12. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar dilakukan kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder meliputi ; 1). Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan. 2). Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat. Cakupan penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 12.Cakupan Penderita Hipertensi yang medapatkan Pelayanan Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023**



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2023

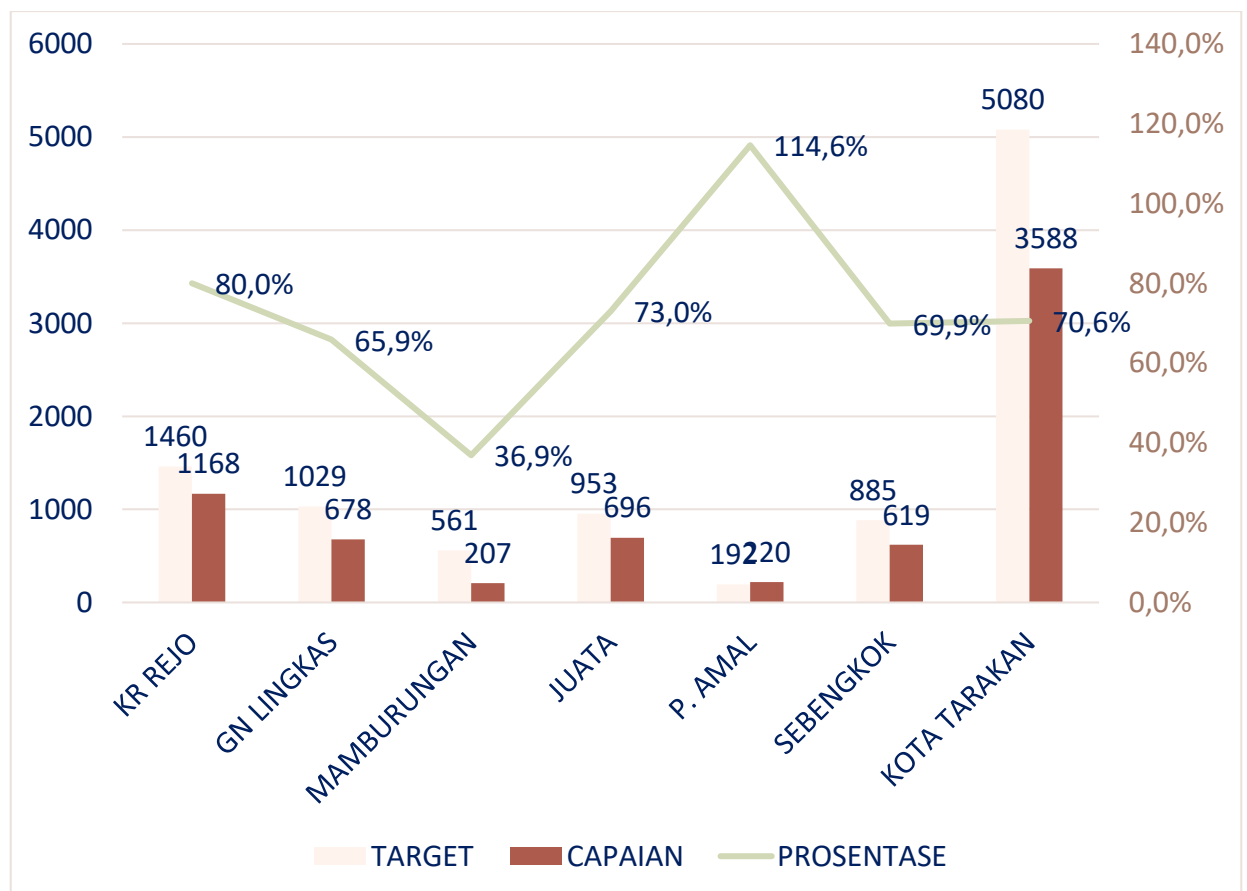
Persentase Pelayanan Kesehatan hipertensi Tahun 2023 sebesar (46,3%). Capaian tertinggi pada Puskesmas Pantai Amal (70.2%) dan terendah pada Puskesmas Mamburungan (21,2%). Hal ini disebabkan karna Penetapan sasaran masih menggunakan estimasi, bukan berdasarkan data penderita hipertensi yang ditemukan oleh masing-masing fasilitas kesehatan dan Belum semua kasus baru penderita

hipertensi yang berobat secara teratur dilaporkan, khususnya dari FKTP yang tidak bekerjasama dengan BPJS, sehingga target masih tinggi.

### 13. Pelayanan Kesehatan Diabetes Mellitus

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar dilakukan kepada seluruh penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar : Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder meliputi: 1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan; 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi; 3) Melakukan rujukan jika diperlukan. Cakupan penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 46,09%, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik.13 Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2023**



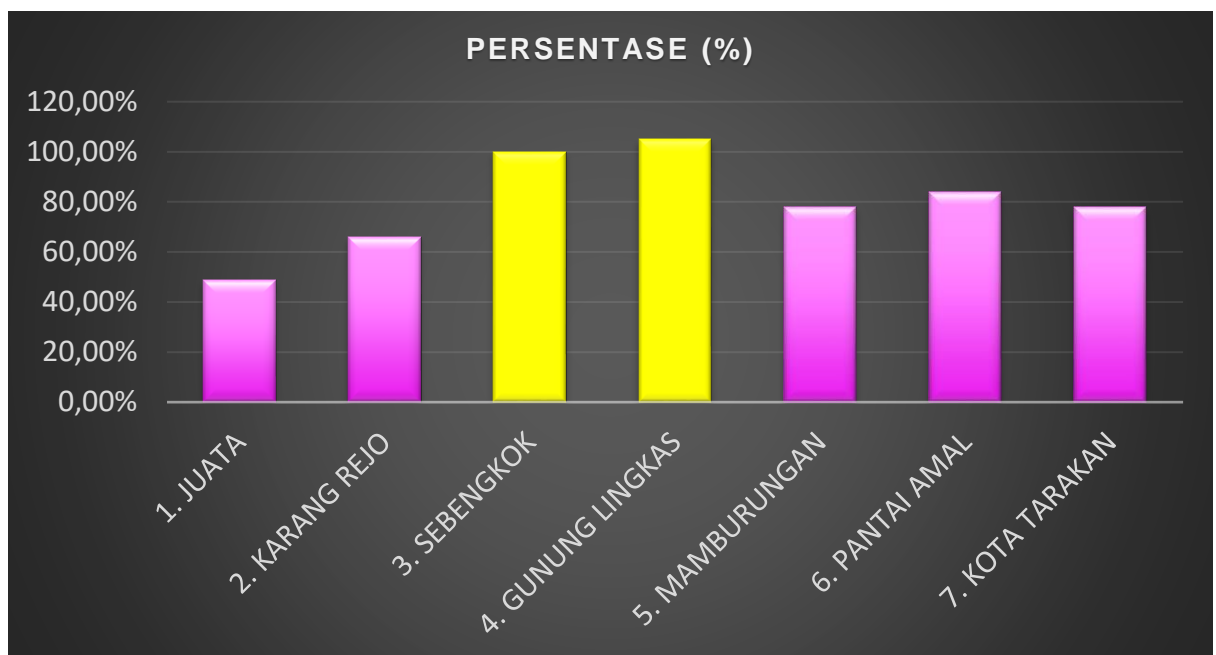
Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2023

Grafik 13 di atas dapat dilihat peresentase Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus Tahun 2023 sebesar (70,6%). Capaian tertinggi pada Puskesmas Pantai Amal (114,6%) dan terendah pada Puskesmas Mamburungan (36,9%).

### **Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)**

Pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat : pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat (psikotik akut dan skizofrenia) sebagai upaya pencegahan sekunder, meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi. Cakupan orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 67,9% dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 14. Persentase Penderita ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar di Kota Tarakan Tahun 2023**

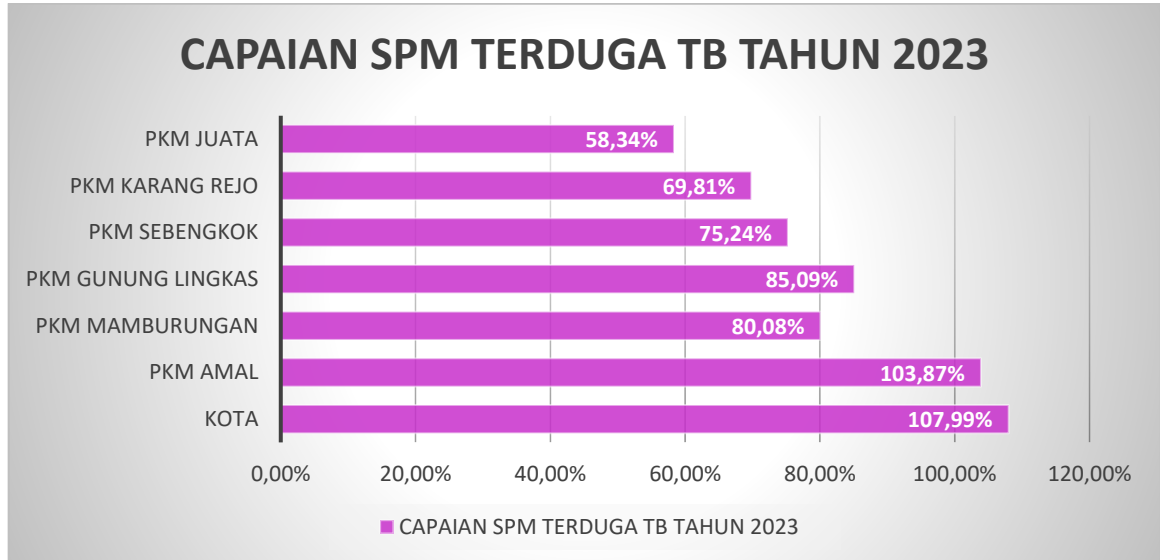


*Sumber : Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit, 2023*

Grafik 14 diatas dapat dilihat persentase Pelayanan Kesehatan OGDJ Berat Tahun 2023 sebesar (78,2%).Capaian tertinggi pada Puskesmas Gunung Lingkas (104,5%) dan terendah pada Puskesmas Juata (48,8%).

#### 14. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar

**Grafik 15. Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar Tahun 2023**

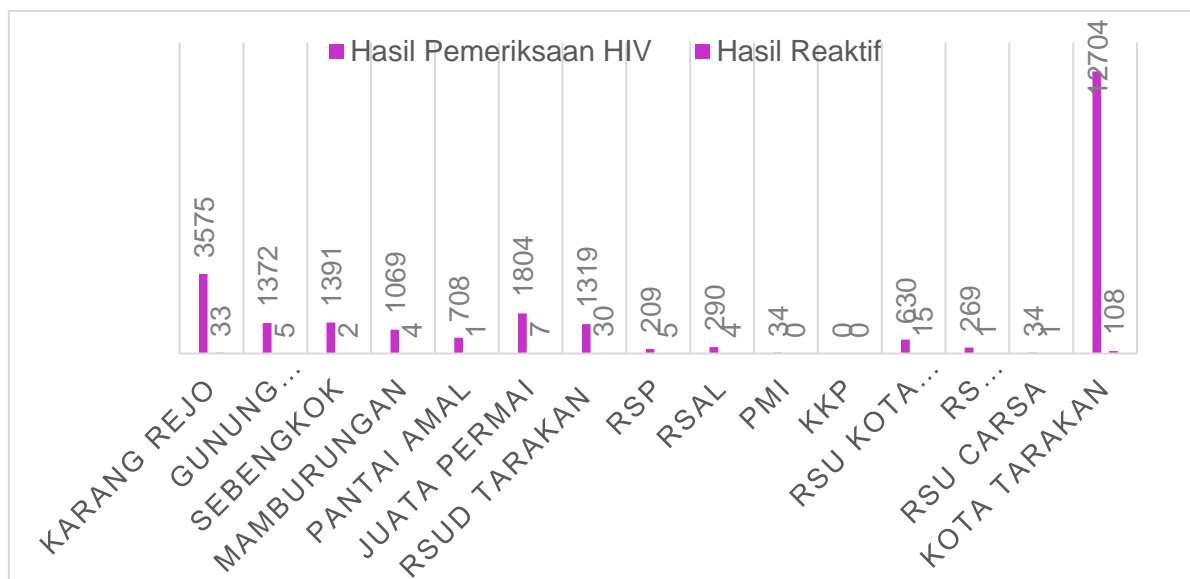


*Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2023*

Grafik. 15 di atas dapat dilihat persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC Sesuai Standar 107.9%, tertinggi pada Puskesmas Pantai Amal (103,87%) dan terendah pada puskesmas Juata (58,34%).

#### 15. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan HIV Sesuai Standar

**Grafik 16. Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan HIV Sesuai Standar**





*Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2023*

Grafik 16. Capaian Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan Tubuh Manusia (Human immunodeficiency Virus=HIV) sudah mencapai target 12704, adapun capaian tertinggi Puskesmas Karang Rejo (3575) dan terendah Puskesmas Pantai Amal (708) adapun kegiatan juga dilakukan di Rumah sakit di Kota Tarakan , Palang Merah Indonesia dan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Adapun Kinerja RSUD Kota Tarakan adalah :

**1. Persentase pemenuhan SDM sesuai standar**

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan perlu ditunjang dengan ketersediaan SDM yang memadai baik SDM kesehatan maupun SDM non kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Persentase pemenuhan SDM sesuai standar tahun 2023 sebesar 89,20% (380 orang) dari target 97,25% ( 426 orang) , Tujuan dari capaian sasaran untuk meningkatkan sumber daya rumah sakit dengan cara meningkatkan persentase SDM adalah salah satu syarat dalam pemenuhan akreditasi Paripurna, di mana tindakan medik menyimpan potensi resiko, sehingga diperlukan tenaga SDM medis dan non medis yang terlatih dan pengetahuan dengan daya ungkit yang luas terhadap keselamatan pasien. Persentase tenaga SDM di RSUD ini terhadap sasaran untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang berkualitas dan terstandarisasi.

**2. Persentase pemenuhan peralatan dan logistik RS sesuai standar**

Persentase pemenuhan peralatan dan logistik RS sesuai standar tahun 2021 sebesar 73,33% masih di bawah Target 80% , namun masih ada kendala yaitu Inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan peralatan belum berjalan secara optimal dan belum ditunjang kecukupan teknisi internal yang terlatih untuk pemeliharaan alat tersebut.

**3. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS sesuai standar**

**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS sesuai standar tahun 2021 90,70% melebihi dari target 80% . kendala yang dihadapi** Inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan peralatan belum berjalan secara optimal dan belum ditunjang kecukupan teknisi internal yang terlatih untuk pemeliharaan alat tersebut.

Tabel 2.1

Kondisi Sarana dan Prasarana RSUD Kota Tarakan Tahun 2021  
Berdasarkan Permenkes 56/2014

<b>NO</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>STANDAR RS KELAS C</b>	<b>KONDISI RSU KOTA TARAKAN</b>
1	Bangunan/ Ruang Gawat Darurat	+	+
2	Bangunan/ Ruang Rawat Jalan	+	+
3	Bangunan/ Ruang Rawat Inap	+	+
4	Bangunan/ Ruang Bedah	+	+
5	Bangunan/ Ruang Rawat Intensif	+	+
6	Ruang Isolasi	+	+
7	Ruang Penyimpanan Peralatan dan Barang Bersih	+	+
8	Ruang Perawat	+	+
9	Ruang Staf Dokter	+	+
10	Ruang Tunggu Keluarga Pasien	+	+
11	Bangunan/ Ruang Isolasi	+	+
12	Bangunan/ Ruang Radiologi	+	+
13	Bangunan/ Ruang Laboratorium Klinik	+	+
14	Bangunan/ Ruang Farmasi	+	+
15	Bangunan/ Ruang Gizi	+	+
16	Bangunan/ Ruang Rehabilitasi Medik	+	+
17	Bangunan/ Ruang Pemeliharaan Sarana Prasarana	+	+
18	Bangunan/ Ruang Pengelolaan Limbah	+	+
19	Ruang Sterilisasi	+	+
20	Bangunan/ Ruang Laundry	+	+
21	Bangunan/ Ruang Pemulasaraan Jenazah	+	+
22	Bangunan/ Ruang Administrasi	+	+
23	Bangunan/ Ruang Gudang	+	+
24	Bangunan/ Ruang Sanitasi	+	+
25	Bangunan/ Rumah Dinas & Asrama	+	+
26	Ambulance	+	+
27	R. Komite Medis	+	+
28	R. PKMRS	+	+
29	R. Perpustakaan	+	-

NO	PERSYARATAN	STANDAR RS KELAS C	KONDISI RSU KOTA TARAKAN
30	Ruang Jaga Koass	+	-
31	R. Pertemuan	+	+
32	Ruang Diklat	+	+
33	Ruang Diskusi	+	+
34	Skill Lab dan Audiovisual	+	-
35	Sistem Informasi Rumah Sakit	+	+
36	Sistem Dokumentasi Medis Pendidikan	+	-
37	Listrik	+	+
38	Air	+	+
39	Gas Medis	+	+
40	Limbah Cair	+	+
41	Limbah Padat	+	+
42	Penanganan Kebakaran	+	+
43	Komunikasi	+	+
	<b>PERSENTASE</b>	<b>100%</b>	<b>90,7%</b>

Terkait efisiensi mutu pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Tabel Efisiensi Mutu Pelayanan Tahun 2023

No.	Indikator	Standar	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Bed Occupation Ratio (BOR)	60-85%	28,48%	47,35%	53,44%
2	Average Length of Stay (AVLOS)	6-9 Hari	3,69 Hari	3,23 Hari	2,90 Hari
3	Turn Over Interval (TOI)	1-3 Hari	8,23 Hari	4,01 Hari	2,53 Hari
4	Net Death Rate (NDR)	<25%	17,90%	4,00%	2,70%
5	Gross Death Rate (GDR)	<45%	31,30%	12,00%	9,30%
6	Bed Turn Over (BTO)	40-50 Kali	31,72 Kali	52,33 Kali	67,24 Kali

Sumber : Data Rekam Medik RSU Kota Tarakan 2023

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, efisiensi mutu pelayanan di RSUD Kota Tarakan dapat disimpulkan sudah sesuai dengan standar sehingga kinerja RSUD Kota Tarakan telah efektif dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang berkunjung di RSUD Kota Tarakan. Berikut secara rinci capaian BOR (Bed Occupation Ratio) per ruangan pada tahun 2023 di RSUD Kota Tarakan.

Tabel 2.3 Bed Occupation Ratio (BOR) per Kelas  
RSUD Kota Tarakan Tahun 2023

No.	Kelas	BOR (%)
1	Kelas III	57.12
2	Kelas II	18.92
3	Kelas I	80.17
4	VIP	2.5
5	ICU	41.32

Sumber : Data Rekam Medik RSUD Kota Tarakan 2023

#### 4. Status BLUD

BLUD adalah singkatan dari Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan atau mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.

Dengan dukungan pemerintah Kota Tarakan dalam hal ini Wali Kota, Bappeda, BPKAD dan Bagian Hukum serta manajemen tim work RSUD Kota Tarakan merupakan kunci keberhasilan Rumah Sakit Umum Kota Tarakan meraih **predikat RS BLUD**. Hal ini tertuang pada Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 900/HK-VIII/204/2019 serta Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Pelaksanaan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2020 RSUKT mulai beroperasi dengan status sebagai BLUD.

Dengan tercapainya Status Rumah Sakit Umum Kota Tarakan menjadi RS BLUD, Rumah Sakit bisa mengelola keuangan secara mandiri, namun masih ada subsidi anggaran dari Pemerintah Kota terkait

gaji SDM RS. Kendala adalah Beban ganda bagi manajemen rumah sakit dalam melaksanakan sistem akuntansi, Keterbatasan SDM dalam pengelolaan dan manajerial keuangan, Sinkronisasi antara sistem keuangan pemerintah daerah dengan sistem BLUD RS.

Ada beberapa keberhasilan yang diperoleh oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Tarakan :

1. Salah satu bentuk keberhasilan Dinas Kesehatan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan ke masyarakat adalah pencapaian program baik yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun Non SPM yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dimana program pelayanan standar pelayanan minimal yang mencapai target 100% ada 2 pelayanan yaitu Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dan pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis .
2. Selain itu di Tahun 2023, mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kota Tarakan Juara 1 Tata kelola kearsipan terbaik.
3. Penghargaan diberikan kepada Puskesmas Gunung Lingkas Kategori Puskesmas dengan Pengelola Vaksinasi COVID -19 terbaik di Provinsi Kalimantan Utara.
4. Penghargaan diberikan kepada Kota Tarakan sebagai Kota Bebas Frambusia Tingkat Nasional.
5. Penghargaan Puskesmas Sebengkok sebagai Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas Terstandarisasi dan menjadi Rujukan Nasional.
6. Penghargaan PPKM Award 2023 Laboratorium dengan Performa Pemeriksaan COVID -19 terbaik di Provinsi Kalimantan Utara ( Laboratorium Kota Tarakan).
7. Penghargaan Puskesmas Karang Rejo Juara II Nasional Digitalisasi Transformasi Award BPJS Kesehatan Tahun 2023.
8. Penghargaan Puskesmas Karang Rejo atas Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Opini Kualitas Tertinggi (A) Tahun 2023.
9. Penghargaan Puskesmas Sebengkok sebagai Puskesmas Berprestasi I Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berprestasi Puskesmas Tingkat Kota Tarakan Tahun 2023.
10. Penghargaan Puskesmas Karang Rejo sebagai Puskesmas Berprestasi II Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berprestasi Puskesmas Tingkat Kota Tarakan 2023.

11. Penghargaan Puskesmas Pantai Amal dengan Kategori KBK 100% bulan Pelayanan Tahun 2022 dan 2023.
12. Penghargaan Puskesmas Pantai sebagai Partisipasi Pencetakan Rekor Muri, senam Pronalis.
13. Penghargaan Pembantu Pengurus Barang Terbaik Kota Tarakan.
14. Rumah Sakit Umum Kota Tarakan mendapatkan penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Kemenpan RB Tingkat Nasional.
15. Rumah Sakit Umum Kota Tarakan mendapatkan penghargaan Bintang 2 Implementasi Digitalisasi Layanan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) oleh BPJS Kesehatan.

Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan dan evaluasi capaian target kinerja SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bahwa realisasi capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Kesehatan secara umum sampai dengan tahun 2023 telah memenuhi target. Namun, kendala yang ada sampai saat ini antara lain :

1. Terkait upaya menekan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI & AKB) kendala yang dihadapi :
  - a. Masih ada ibu hamil yang tidak rutin memeriksakan kesehatannya ke Puskesmas
  - b. Ibu hamil dengan riwayat Kekurangan Energi Kronik (KEK) dalam jangka waktu lama
  - c. Kurangnya pengetahuan ibu hamil dan keluarga terkait kehamilannya.
  - d. Ibu hamil dengan risiko tinggi
  - e. Kurangnya koordinasi dan kerjasama oleh ibu hamil pada saat dilaksanakan Home Care oleh petugas Puskesmas.
  - f. Masih ada yang melahirkan di dukun
  - g. Faktor ekonomi ibu hamil
2. Terkait dengan Angka Kematian Bayi pada Tahun 2023 dibawah target nasional Kementerian Kesehatan , dengan angka absolut kematian sebanyak 32 orang dikarenakan Up date kompetensi petugas kegawatdaruratan neonatal kurang, adanya kasus anemiaprogram lainnya seperti Lansia sangat dipengaruhi oleh ketersediaan reagen dan BHP untuk pelaksanaan screening Kesehatan.
3. Kerjasama antar Puskesmas dan lintas sector terkait masih perlu dimaksimalkan.

Keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan**

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Targ et NSP K	Targe t IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						202 0	202 1	202 2	202 3	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	-	IKU/I KK	DALEV	42	42	42	42	41	42	63	42	127	97	100	150	100	302	237
2	Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran hidup	-	IKU/I KK	DALEV	12	6	6	6	6	6	4	7	7	7	50	67	117	113	113
3	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%		IKU	IKP	14,8	10	9,5	7,5	14,0	14,8	8,8	6,39	4,56	3,84	100	88	67,26	60,80	27,4
4	Indeks Keluarga Sehat	Angka		IKU		0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	n/a	0,1	0,21	0	0,36	n/a	100	105	143,3	72,0
5	Cakupan Kepesertaan JKN	%		IKU		50	96	97	98	98	95	97	97,53	99,51	101,92	190	101,04	100,55	101,54	104,00
6	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	Nilai		IKU		70/B	70/B	70/B	70/B	77/B B	67/B	75,77/ BB	84,42 /A	84/A						



7	Indeks Kepuasan masyarakat	Nilai		IKU		70	71	72	73	75	80,25	85	84,26	85,29	86,2	115%	120%	117%	117%	115%
6	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	127%	91%	97%	98%	62%	127%	91%	97%	98%	62%
7	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	134%	93%	98%	99%	58,13 %	134%	93%	98%	99%	58,13%
8	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	138%	94,64%	100%	97%	59,32 %	138%	94,64%	100%	97%	59,32%
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	#### ##	25,70%	43,65 %	100%	76,28 %	20,01 %	25,70%	43,65 %	100%	76,28%

10	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	#### ##	38,54%	90,69 %	44,45 %	88%	93,63 %	38,54%	90,69 %	44,45%	88%
11	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	16,0 %	19%	23%	86%	65,52 %	16,08 %	19%	23%	86%	65,52%
12	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,81 %	5,46%	13,35 %	100%	97,57 %	4,81 %	5,46%	13,35 %	100%	97,57%
13	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai	%	SPM	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10,05 %	15,89%	17,48 %	42,83 %	51,08 %	10,05 %	15,89%	17,48 %	42,83%	51,08%

	Standar																			
14	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	31,54 %	46,09%	55,09 %	64,23 %	86,50 %	31,54 %	46,09%	55,09 %	64,23%	86,50%
15	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	63,12 %	67,86%	70,11 %	100,91 %	75%	63,12 %	67,86%	70,11 %	100,91%	75%
16	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	56,85 %	118%	100%	103,60 %	61%	56,85 %	118%	100%	103,60%	61%

17	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV Sesuai Standar	%	SPM	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	119%	100%	102,23 %	52%	100%	119%	100%	102%	52%
18	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	-	LAKIP	DALEV	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	94,9	93,87	100	80	100	9490	9387	10000	8000
19	Persentase Alat Kesehatan di UPT yang telah Terkalibrasi	%			IKP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98%	98%	0	78,86 %		98%	98%	0	78,86%	0%
20	Jumlah UPT yang Terakreditasi	Angka			IKP	4	3	6	4	7	7	7	7	6	6	175%	233%	117%	150%	86%
21	Cakupan Pneumonia Balita	%			IKP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	52,50 %	180%	92,5%	71,9%	78,74 %	52,50 %	180,00 %	92,50 %	71,90%	83,64%
22	Cakupan Penemuan Diare Semua Umur	%			IKP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	52%	170%	62,88 %	41,35 %	122,31 %	52,00 %	169,60 %	62,88 %	41,35%	122,31%

23	Persentase Perempuan Usia 30-50 tahun yang Dideteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara	%			IKP	40	40	40	40	40	5,5	0	2,8	2,57	9,47	13,75	0	7,00	6,43	23,68
24	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Minimal 50% Sekolah	%			IKP	50	50	50	50	50	28	28	34	62,31	50,57	56	56	68	124,62	101,14
25	Cakupan Kelurahan UCI	%			IKP	85	90	95	97	100	40	25	25	62,2		47,06	27,78	26,32	64,12	0,00
26	Cakupan Kelurahan yang Mengalami KLB dilakukan PE < 24 Jam	%			IKP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27	Persentase Posyandu Aktif	%			IKP	25	30	35	35	45	23,84	30,41	24,3	73,65	45,95	95,36	101,36 67	69,428 6	210,428 6	102,11

28	Persentase PHBS Tatanan Rumah Tangga	%			IKP	50	55	60	65	65	39,60	39,68	53,11	53,11	83	79,2	72,15	88,52	81,71	127,69
29	Prevalensi wasting pada balita (kurus dan sangat kurus)	%			IKP				7	7		1,65	2,02	1,83	1,2				26,14	17,14
33	Persentase Tindak lanjut kasus gigitan hewan penular rabies (anjing, kucing, dan kera)	%			IKP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34	Cakupan Kelurahan yang mengalami KLB dilakukan PE < 24 jam	%			IKP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35	Angka Kesakitan (IR) DBD	per 100.000 penduduk			IKP	<48	< 48	< 48	< 48	< 48	46,9	25,4	267,2	165	99,22	97,7	52,9	556,7	343,8	206,7

### **C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN**

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Tarakan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Tujuan dan sasaran Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kesehatan Kota Tarakan senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis bidang kesehatan merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan kesehatan di Kota Tarakan 2 (Dua) tahun kedepan.

Pada dasarnya pembangunan kesehatan selama 2 (Dua) tahun terakhir di Kota Tarakan secara makro sudah berjalan dengan baik meskipun masih memiliki catatan capaian indikator kesehatan yang masih rendah. Berdasarkan dokumen RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026 permasalahan pembangunan kesehatan merupakan bagian dari permasalahan kesejahteraan sosial yang dispesifikkan dalam isu:

1. Angka Kematian Ibu di Tarakan sepanjang 2 (dua) tahun terakhir tercatat mengalami kenaikan dari batas maksimal yang telah ditetapkan tingkat Kota Tahun 2021 sebesar 63 per 100.000 KH, Tahun 2022 sebesar 42 dan tahun 2023 sebesar 127 per 100.000 kelahiran.
2. Angka Kematian Bayi menunjukkan angka peningkatan, Tahun 2021 sebesar 4 per 1000, Tahun 2022 sebesar 7 per 1000, dan 7 per 1000 kelahiran tahun 2023
3. Masih ditemukannya kasus stunting balita di Kota Tarakan. Meskipun prevalensi masih dibawah nasional namun untuk target yang ditetapkan Pemerintah Kota

Tarakan masih tinggi. Berdasarkan data Capaian Tahun 2023 sebesar 4,5 % dari target 7,5 %.

4. Pemenuhan SPM bidang kesehatan melalui siklus kehidupan baik memenuhi standar mutu yang masih belum maksimal.
5. Sebagai kota yang berkembang dan statusnya sebagai kota transit bagi orang dan barang yang akan ke wilayah utara Kalimantan, pola penyakit di Tarakan mengalami transisi epidemiologi. Pola penyakit yang terjadi saat ini di Tarakan yaitu masih tersebarnya penyakit menular, meningkatnya kasus penyakit tidak menular, dan re- emerging disease (triple burden), prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat.
6. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes meningkat.
7. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dan mencukupi baik dalam jumlah maupun jenis tenaga terutama dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan tenaga Kesehatan lainnya. Selain itu, kompetensi tenaga Kesehatan yang juga perlu ditingkatkan sehingga sesuai dengan standard keahlian yang harus dimiliki
8. Ketersediaan sarana, prasarana, alat Kesehatan dan kebutuhan logistik yang masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas sehingga sesuai dengan kebutuhan.
9. Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi PPK BLUD di RS Kota, Puskesmas dan Labkesda perlu dimaksimalkan sehingga tujuan dari PPK BLUD dapat tercapai.
10. Belum maksimalnya penggunaan Data Informasi Kesehatan sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan serta kebijakan, hal ini disebabkan banyaknya data yang tersedia namun Analisa dan pemanfaatan teknologi dalam pengolahan data yang masih belum maksimal.

Salah satu permasalahan utama dari tujuh permasalahan pembangunan Kota Tarakan yaitu rendahnya daya saing SDM Kota Tarakan. Dimana pembangunan kesehatan sangat berperan dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia.



Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) berhubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kota Tarakan berperan di berbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Rendahnya daya saing SDM Kota Tarakan memiliki masalah inti yakni rendahnya kualitas SDM. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan terkait kualitas SDM yang akan berdampak pada peningkatan daya saing masyarakat Kota Tarakan.

Indikator untuk mengukur kualitas SDM antara lain dengan mengukur sejauh mana SDM Kota Tarakan dapat bersaing dengan SDM wilayah lain, sekurang-kurangnya di “negeri” sendiri. Meski nilai IPM Kota Tarakan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun apabila dicermati lebih jauh, diketahui masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya terkait pembangunan kesehatan yaitu:

Kondisi di Kota Tarakan belum berada dalam kondisi yang ideal, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas derajat dan pelayanan kesehatan di masyarakat, walaupun umur harapan hidup di Kota Tarakan sudah cukup baik dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih terdapat Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023 sebesar 127 per 100.000 kelahiran

Kualitas pelayanan yang belum merata juga menjadi persoalan yang akan berdampak pada derajat kesehatan masyarakat yang perlu terus ditingkatkan. Melihat hal-hal tersebut di atas maka pelayanan perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan menjadi penting mengingat kerentanan sosial juga dapat muncul sebagai akibat dari minimnya perhatian terhadap pembangunan kesehatan.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Ketentuan mengenai SPM Kesehatan secara tegas menjelaskan bahwa SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

#### **D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2024.**

Review terhadap rancangan Akhir RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Kesehatan Kota Tarakan berdasarkan Rancangan Akhir RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Review terhadap rancangan akhir RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dapat dijabarkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025

## Dinas Kesehatan Kota Tarakan

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RENJA 2025			Hasil Pembahasan PJ (Rankhir)			Realisasi 2023	Pagu 2024	OPD
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
1.					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							167.905.057.443		Dinas Kesehatan
1.	2.				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			158.246.346.264	-	500%	167.905.057.443	- 168.472.595.562		Dinas Kesehatan
1.	2.	01.			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	132.452.732.739	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	131.570.695.158			Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	11 Dokumen	25.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	11 Dokumen	11.000.000			Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.01.	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	20.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2.000.000		-	Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.01.	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2.000.000	-	-	RSUKT
1.	2.	01.	2.01.	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.000.000			Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.01.	08	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000			Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	9 Layanan	59.033.533.859	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	9 Layanan	59.388.157.140			Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 --> 319 orang/bulan	35.000.000.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 orang/bulan	35.623.563.759	28.198.349.718	33.429.806.981	Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 orang/bulan	12.047.658.259	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 orang/bulan	12.911.017.781	9.234.178.318	11.647.658.259	RSUKT
1.	2.	01.	2.02.	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	5.000.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3.867.700.000	5.180.191.495	5.037.736.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.02.	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6.985.875.600	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6.985.875.600	5.307.216.458	5.989.378.000	RSUKT
1.	2.	01.	2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	7 Layanan	283.000.000	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	7 Layanan	185.100.000			Dinas Kesehatan

1.	2.	01.	2.05.	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	600 Paket	210.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	600 Paket	179.100.000	119.016.000	-	Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.05.	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (RSUKT)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	98 Paket	49.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	98 Paket	-	-	-	RSUKT
1.	2.	01.	2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi	8 Layanan	380.000.000	Jumlah layanan administrasi	8 Layanan	324.091.230			Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.06.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.992.140	4.327.000	10.059.058	Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.06.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	4 Paket	200.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik	4 Paket	153.221.090	113.505.920	119.989.240	Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.06.	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	60.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	44.994.000	47.595.250	44.994.000	Dinas Kesehatan
					Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Laporan Fasilitasi	1 Laporan	6.000.000			Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	99.884.000	53.701.257	73.247.800	Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah aset/BMD yang diadakan	103 unit	1.000.000.000	Jumlah aset/BMD yang diadakan	103 unit	604.104.788			Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.07.	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	500.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-		27.759.114	Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.07.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	43 Unit	300.000.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	100 Unit	298.000.008	170.520.900	752.504.404	Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.07.	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	106 Unit	306.104.780		592.707.200	Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	7 Layanan	1.430.000.000	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	7 Layanan	1.297.570.000			Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.08.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 laporan	20.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 laporan	10.000.000	12.000.000	13.000.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	1 laporan	610.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	1 laporan	610.000.000	515.505.254	609.220.710	Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.08.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	37 petugas	800.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	37 petugas	677.570.000	668.489.561	715.920.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	356 Unit	1.380.000.000	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	356 Unit	1.620.000.000			Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 unit	20.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 unit	10.000.000	5.085.100	18.910.680	Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.09.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	300.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	300.000.000	329.050.310	278.033.511	Dinas Kesehatan

1.	2.	01.	2.09.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dinelihara /Dinehabilitasi	2 Unit	500.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dinelihara /Dinehabilitasi	1 Unit	500.000.000	2.671.548.475	442.684.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.09.	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 Unit	500.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	4 Unit	750.000.000	-	-	Dinas Kesehatan
1.	2.	01.	2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas	85	1.696.000.000	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas	85	1.680.000.000	10.286.196.847	16.119.014.967	PKM Gunung Lingkas
1.	2.	01.	2.10.	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gunung Lingkas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 unit Kerja	1.696.000.000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 unit Kerja	1.680.000.000			PKM Gunung Lingkas
1.	2.	01.	2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	4.471.494.000	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	4.464.600.000			PKM Karang Rejo
1.	2.	01.	2.10.	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Karang Rejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 unit Kerja	4.471.494.000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 unit Kerja	4.464.600.000			PKM Karang Rejo
1.	2.	01.	2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juata	85	1.216.700.000	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juata	85	1.825.600.000			PKM Juata
1.	2.	01.	2.10.	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Juata	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit Kerja	1.216.700.000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit Kerja	1.825.600.000			PKM Juata
1.	2.	01.	2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	1.730.000.000	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	1.437.000.000			PKM Sebengkok
1.	2.	01.	2.10.	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sebengkok	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit Kerja	1.730.000.000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit Kerja	1.437.000.000			PKM Sebengkok
1.	2.	01.	2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	1.841.000.000	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	1.312.800.000			PKM Mamburungan
1.	2.	01.	2.10.	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Mamburungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 unit Kerja	1.841.000.000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 unit Kerja	1.312.800.000			PKM Mamburungan
1.	2.	01.	2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	588.200.000	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	572.672.000			PKM Pantai Amal
1.	2.	01.	2.10.	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pantai Amal	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 unit Kerja	588.200.000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 unit Kerja	572.672.000			PKM Pantai Amal
1.	2.	01.	2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	700.000.000	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	848.000.000			Labkesda
1.	2.	01.	2.10.	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Labkesda	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit Kerja	700.000.000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit Kerja	848.000.000			Labkesda
1.	2.	01.	2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian SPM RS	85	56.677.804.880	Persentase capaian SPM RS	85	56.000.000.000			RSUKT
1.	2.	01.	2.10.	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUKT	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 unit Kerja	56.677.804.880	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 unit Kerja	56.000.000.000	63.828.326.924	45.000.000.000	RSUKT
1.	2.	02.	.		<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan</b>	<b>Persentase UPT yang</b>	<b>100%</b>	<b>23.253.861.925</b>	<b>Persentase UPT yang</b>	<b>100%</b>	<b>34.037.826.495</b>			<b>Dinas Kesehatan</b>
1.	2.	02.	2.01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang memiliki fasilitas kesehatan sesuai standar	9 UPT	7.950.000.000	Jumlah UPT yang memiliki fasilitas kesehatan sesuai standar	9 UPT	15.874.566.410			Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.01.	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	350.000.000	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	350.000.000			Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.01.	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit	-			Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.01.	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	0 Unit	-	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	0 Unit	-			Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.01.	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit	-	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	5.698.440.000	2.687.045.700	200.000.000	RSUKT

1.	2.	02.	2.01.	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	1.000.000.000	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10 Unit	1.834.260.200		2.739.116.321	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.01.	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 Unit	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 Unit	-			Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.01.	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0 Unit	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0 Unit	-			RSUKT
1.	2.	02.	2.01.	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1.200.000.000	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0 Unit			700.000.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.01.	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	100 Unit	1.000.000.000	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Unit			180.000.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.01.	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	600.000.000	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit		180.000.000		Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.01.	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	300.000.000	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	34.250.000			Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.01.	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	-	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit				RSUKT
1.	2.	02.	2.01.	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit	1.500.000.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	23 Unit	1.500.000.000	1.869.747.585	1.325.117.140	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.01.	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	3.750.000.000		3.634.863.843	RSUKT
1.	2.	02.	2.01.	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	0 Unit	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	69 Unit	712.000.000		400.000.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.01.	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket	2.000.000.000	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket	1.960.000.000	1.703.915.228	1.906.000.000	Dinas Kesehatan

1.	2.	02.	2.01.	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Paket	-	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Paket	35.616.210	34.995.400	40.000.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan pelayanan kesehatan	9 UPT	14.529.496.925	Jumlah UPT yang melaksanakan pelayanan kesehatan	9 UPT	17.628.001.225			Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5000 Orang	100.000.000	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5000 Orang	93.709.600	252.370.250	307.446.600	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4800 Orang	70.800.000	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4800 Orang	70.800.000	51.682.500	246.717.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4700 Bayi	100.200.000	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4700 Bayi	100.200.000	61.310.185	230.164.421	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11000 Balita	162.999.660	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11000 Balita	163.049.600	216.541.660	150.000.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34000 Anak	156.000.000	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34000 Anak	156.000.000	292.580.000	328.080.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48000 Orang	160.000.000	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48000 Orang	159.981.030	29.717.500	138.492.630	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8000 Orang	50.000.000	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8000 Orang	110.772.000	70.130.280	64.947.850	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13000 Orang	62.994.920	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13000 Orang	61.002.650	18.589.000	62.388.810	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3700 Orang	50.000.000	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3700 Orang	50.000.000	201.064.480	293.762.800	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	400 Orang	50.000.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	400 Orang	49.992.500	33.181.500	28.770.500	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5503 Orang	25.000.000	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5503 Orang	197.000.000	31.650.000	1.158.588.240	Dinas Kesehatan

1.	2.	02.	2.02.	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6838 Orang	55.485.000	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6838 Orang	61.450.000	123.370.000	194.950.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	75.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	75.000.000	30.183.400	266.338.750	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah orang yang dilakukan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22307	42.000.000	Jumlah orang yang dilakukan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22307	48.148.398	489.084.440	2.113.571.027	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah orang yang dilakukan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3500	32.000.000	Jumlah orang yang dilakukan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3500	32.000.000	92.910.000	1.200.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah sarana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2836	100.000.000	Jumlah sarana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2836	100.000.000	845.110.200	1.023.102.520	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah orang yang dilakukan Pelayanan Promosi Kesehatan	48954	49.995.270	Jumlah orang yang dilakukan Pelayanan Promosi Kesehatan	48954	69.344.000	193.398.690	213.562.100	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokmen	154.013.700	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokmen	153.998.200	81.400.000	475.471.800	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	0 Orang	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	800 Orang	-	23.900.000	39.867.330	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	100 Orang	50.000.000	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	100 Orang	36.995.000	2.950.000	39.376.960	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	0 Dokumen	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	0 Dokumen	-			Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	635.231.735	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	635.106.800	783.087.970	1.556.853.764	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	8 dokumen	10.724.688.320	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	13.683.418.681	12.135.954.209	10.724.688.320	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	250 org	75.000.000	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	250 org	74.873.200		39.140.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	5 paket	68.000.000	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	5 paket	59.150.600	1.650.000	61.617.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen	25.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen	19.476.940		14.409.150	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	6 unit	100.000.000	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			77.737.340	66.503.488	Dinas Kesehatan



1.	2.	02.	2.02.	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan					Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			800.087.705	690.113.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	400.000.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	500.000.000	582.781.428	934.749.910	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	7 Unit	200.000.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	7 Unit	174.253.020	397.060.372	146.210.300	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota					RSUKT
1.	2.	02.	2.02.	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 laporan	35.000.000	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 laporan	34.998.800	100.000	8.600.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pertemuan Koordinasi Terintegrasi Lintas Program atau dengan Lintas Sektor Kota Puskesmas, Analisis Hasil PISPK, Monev PISPK, Kunjungan Rumah	1000 Kegiatan	100.000.000	Pertemuan Koordinasi Terintegrasi Lintas Program atau dengan Lintas Sektor Kota Puskesmas, Analisis Hasil PISPK, Monev PISPK, Kunjungan Rumah	1000 Kegiatan	104.325.320	11.200.000	29.425.320	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1019	45.000.000	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1019	45.000.000	12.684.500	24.320.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/OADS (ODHA)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	120 orang	50.000.000	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	120 orang	50.000.000	2.400.000	37.005.500	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Malaria	960 orang	50.000.000	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Malaria	960 orang	33.140.000	57.342.325	108.109.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Catin dan Akseptor aktif yang dilakukan pelayanan kesehatan reproduksi	38638	31.500.000	Jumlah Catin dan Akseptor aktif yang dilakukan pelayanan kesehatan reproduksi	38638	31.496.998		31.500.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	46	Pengelolaan Upaya Kesehatan ibu dan anak	Jumlah ibu dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan	11000	393.588.320	Jumlah ibu dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan	11000	393.317.888		393.588.320	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.02.	59	Penyusunan Kebijakan/ Regulasi Bidang Kesehatan			50.000.000						Dinas Kesehatan

1.	2.	02.	2.03.		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah OPD dan UPT yang menerapkan sistem informasi	9 Unit	350.000.000	Jumlah OPD dan UPT yang menerapkan sistem informasi	9 Unit	175.781.860			Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.03.	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	8 dokumen	200.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	8 dokumen	95.193.390		124.520.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.03.	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi	1 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi	1 Dokumen	10.000.000			Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.03.	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	1 unit	100.000.000	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	7 unit	70.588.470			Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.04.		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang menerapkan BLUD	100 Persen	424.365.000	Jumlah UPT yang menerapkan BLUD	100 Persen	359.477.000			Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.04.	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata	1 Unit	100.000.000	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata	1 Unit	100.000.000			RSUKT
1.	2.	02.	2.04.	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan	15 Unit	144.365.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan	15 Unit	259.477.000	236.743.979	197.619.700	Dinas Kesehatan
1.	2.	02.	2.04.	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	6 Dokumen	180.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	0 Dokumen	-			RSUKT
1.	2.	03.			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya</b>	<b>Persentase SDM Kesehatan yang</b>	<b>100%</b>	<b>386.931.600</b>	<b>Persentase SDM Kesehatan yang</b>	<b>100%</b>	<b>252.577.530</b>			<b>Dinas Kesehatan</b>
1.	2.	03.	2.02.		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan	Jumlah UPT yang terpenuhi	9 UPT	300.000.000	Jumlah UPT yang terpenuhi	9 UPT	206.366.400			Dinas Kesehatan
1.	2.	03.	2.02.	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	75 Orang	150.000.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	75 Orang	105.429.400			Dinas Kesehatan
1.	2.	03.	2.02.	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			-		RSUKT
1.	2.	03.	2.02.	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	150.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	100.937.000	20.980.000	97.007.980	Dinas Kesehatan
1.	2.	03.	2.03.		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang memenuhi persyaratan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	8 UPT	86.931.600	Jumlah UPT yang memenuhi persyaratan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	8 UPT	46.211.130			Dinas Kesehatan
1.	2.	03.	2.03.	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	86.931.600	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	46.211.130	486.880.750	465.022.830	Dinas Kesehatan

1. 2.	04.		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan	Persentase pengawasan obat dan	100%	410.000.000	Persentase pengawasan obat dan	100%	70.898.260			Dinas Kesehatan
1. 2.	04.	2.01.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat	Jumlah rekomendasi izin yang	25 Ijin	100.000.000	Jumlah rekomendasi izin yang	25 Ijin	25.054.620			Dinas Kesehatan
1. 2.	04.	2.01.	01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen	25.054.620		255.886.950	Dinas Kesehatan
1. 2.	04.	2.01.	02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	42 sarana	50.000.000	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	42 sarana	-	85.210.260		Dinas Kesehatan
1. 2.	04.	2.03.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan	194 IRTP	260.000.000	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan	194 IRTP	9.773.440			Dinas Kesehatan
1. 2.	04.	2.03.	01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	194 Dokumen	260.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3 Dokumen	9.773.440	60.928.150	8.275.000	Dinas Kesehatan
1. 2.	04.	2.06.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah pemeriksaan post masket dan pengelolaan data perizinan produk makanan dan minuman IRT	96 Sarana	50.000.000	Jumlah pemeriksaan post masket dan pengelolaan data perizinan produk makanan dan minuman IRT	96 Sarana	36.070.200			Dinas Kesehatan
1. 2.	04.	2.06.	01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	96 Sarana	50.000.000	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	96 Sarana	36.070.200	52.979.770	199.396.600	Dinas Kesehatan

1.	2.	05.	.		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>1.742.820.000</b>	<b>Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>1.973.060.000</b>			<b>Dinas Kesehatan</b>
1.	2.	05.	2.01.		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.676.000.000	Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.861.060.000			Dinas Kesehatan
1.	2.	05.	2.01.	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1.676.000.000	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1.861.060.000	1.635.600.000	1.676.000.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	05.	2.02.		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Promotif dan Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	5 Kegiatan	50.000.000	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Promotif dan Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	5 Kegiatan	81.000.000			Dinas Kesehatan
1.	2.	05.	2.02.	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5 Kegiatan	50.000.000	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5 Kegiatan	81.000.000	35.880.000	50.000.000	Dinas Kesehatan
1.	2.	05.	2.03.		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan dan pelaksanaan UKBM	50 kegiatan	16.820.000	Jumlah kegiatan pengembangan dan pelaksanaan UKBM	50 kegiatan	31.000.000			Dinas Kesehatan
1.	2.	05.	2.03.	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	50 kegiatan	16.820.000	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	50 kegiatan	31.000.000	296.361.540	140.155.000	Dinas Kesehatan

#### **E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2025 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN RENJA**

Berdasarkan RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026, Renja Dinas Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2025 merupakan tahun pertama pembangunan jangka menengah daerah, oleh karena itu segala kebijakan yang akan dilaksanakan harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025 ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen perencanaan pembangunan, baik nasional, Provinsi Kalimantan Utara maupun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025.

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.**

##### **A. Prioritas dan sasaran pembangunan Nasional Tahun 2025**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan kemiskinan, pelayanan dasar, visi dan misi, serta program kepala daerah.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Nasional tahun 2025 selanjutnya dituangkan ke dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2025 dengan 8 (Delapan) Prioritas Nasional. 8 (Delapan) Prioritas Nasional tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian

pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. 8 (Delapan) Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 disampaikan sebagai berikut :

- 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif koperasi.
- 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
- 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
- 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
- 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

### Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Untuk mengawal keberhasilan prioritas nasional tersebut maka Dinas Kesehatan Kota Tarakan telah mengintegrasikan sasaran pembangunan nasional dengan Renja PD pada tahun 2025 sebagai berikut :

	Prioritas Nasional		Sasaran Pembangunan
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,	1	Hasil Pembelajaran : a) Rata-rata Nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains
			b) Rata-rata lama sekolah

	Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		penduduk usia 15 tahun ke atas (Tahun)
			c) Harapan Lama Sekolah (Tahun)
		2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)
		3	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
		4	Tingkat Penguasaan Iptek : a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b) Peringkat Indeks Inovasi Global
		5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
		7	Usia Harapan Hidup (Tahun)
		8	Kesehatan Ibu dan Anak a) Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) b) Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)
		9	Insidensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
		10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
		11	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
		12	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
PN 6	Membangun dari Desa dan dari	1	Terbangunnya Sistem



	Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		Perlindungan Sosial yang Adaptif bagi Seluruh Penduduk (%)
		2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
		3	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)
		4	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)
		5	Persentase Desa Mandiri (%)
		6	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)
		3	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)

## B. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Tahapan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun periode 2021-2026 memasuki tahun ke empat. Dalam rangka mencapai visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara periode 2021-2026, maka ditetapkan tema atau fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 :

**“Pemantapan Industri dan Perdagangan komoditas Unggulan Daerah”**

Pada Tahun 2025 dipastikan sebagian besar target dari tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 dapat tercapai, yang memastikan semakin meningkatnya manfaat dan hasil nyata pelaksanaan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah , Desa/Kelurahan bagi

perubahan, kemajuan rakyat dan kemajuan daerah. Hal tersebut didukung oleh semakin mantapnya kualitas inovasi industri daerah dan kemajuan perdagangan produk unggulan industri yang didukung kualitas sumberdaya manusia, kuantitas dan kualitas infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kondisi semakin tingginya pertumbuhan serta pemerataan ekonomi.

Dengan mencermati dan memahami dinamika pembangunan, permasalahan, dan menelaah sasaran dan prioritas dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 khususnya tahun 2025 dengan tema pembangunan Provinsi Kalimantan Utara maka prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

1. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan.
2. Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)
3. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas dan Jaminan Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak tambak di setiap Kabupaten/Kota.
4. Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di setiap Kabupaten/Kota.
5. Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota.
6. Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komperatif di setiap Kabupaten/Kota.
7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawaskan.
8. Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial.
9. Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku Umkm di Setiap Kabupaten/Kota
10. Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, Tenaga Pendidikan, dan Kependidikan pada Semua Tingkatan Satuan Pendidikan, Tenaga Kesehatan serta Tenaga Honorer di Daerah Perbatasan, Pedalaman dan Terpencil serta Perkotaan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

#### **A. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN 2020-2024**

Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan

penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

Kelima arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut digunakan sebagai pemandu dalam menyusun Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024. Lima tujuan dan 8 sasaran strategis sebagai berikut :

**Tujuan Strategis 1.** Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup, dengan Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat

**Tujuan Strategis 2.** Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dengan Sasaran Strategis :

2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan

**Tujuan Strategis 3.** Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan Sasaran Strategis :

3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat

**Tujuan Strategis 4.** Peningkatan sumber daya Kesehatan, dengan Sasaran Strategis :

4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan

**Tujuan Strategis 5.** Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif, dengan Sasaran Strategis :

7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan.

Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan dalam RPJMN 2020-2024 sebanyak 15 indikator yaitu :

1. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup), kondisi awal 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015), target 2024 sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup.
2. Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) kondisi awal 24 per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2017), target tahun 2024 sebesar 16 per 1000 kelahiran hidup.
3. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) kondisi awal 27,7 % (SSGBI 2019) target 2024 sebesar 14%.
4. Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) kondisi awal 10,2 % (Riskesdas 2018), target 2024 sebesar 7%.
5. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) kondisi awal 0,24 per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV (Kemkes, 2018), target 2024 sebesar 0,18 per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV.
6. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) kondisi awal 319 per 100.000 penduduk (Global TB Report 2017), target tahun 2024 sebesar 190 per 100.000 penduduk.
7. Eliminasi malaria (kabupaten/kota), kondisi awal 285 kabupaten/kota (Kemkes, 2018), target 2024 sebesar 405 kabupaten/kota.

8. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%) kondisi awal 9,1 (Riskesdas 2018), target 2024 sebesar 8,7.
9. Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%) kondisi awal 21,8 (Riskesdas 2018), target 2024 sebesar 21,8.
10. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%) kondisi awal 57,9 % (Riskesdas 2018) target 2024 sebesar 90%.
11. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%) kondisi awal 40 % (Kemkes, 2018), target 2024 sebesar 100%.
12. Persentase rumah sakit terakreditasi kondisi awal 63 % (Kemkes, 2018) target 2024 sebesar 100%.
13. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%) kondisi awal 23% (Kemkes, 2018), target 2024 sebesar 83%.
14. Persentase puskesmas tanpa dokter (%) , kondisi awal 12% (Kemkes, 2019), target 2024 sebesar 0.
15. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%) kondisi awal 86 % (Kemkes, 2018), target 2024 sebesar 9%.

## **B. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2021-2026**

Telaah Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan dengan Renstra Dinkes Provinsi Kalimantan Utara terdapat sinkronisasi. Renstra Dinkes Provinsi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yaitu: “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera” Untuk mewujudkan hal tersebut, maka telah dirumuskan 14 (Empat Belas) Misi dimana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-3 (Ketiga) yaitu mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara merumuskan tujuan yang ingin dicapai yaitu “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata”. Adapun untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan pembangunan Dinas Kesehatan diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai.

Sasaran dan indikator dari masing-masing sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak dengan indikator sasaran :
  - 1.1 Angka kematian ibu AKI, kondisi awal Tahun 2020 sebesar Tahun 2026 sebesar 89.30.
  - 1.2 Angka kematian bayi (AKB) kondisi awal Tahun 2020 sebesar 23.34 Tahun 2026 sebesar 14.50.
  - 1.3 Persentase stunting kondisi awal Tahun 2020 sebesar 25 Tahun 2026 sebesar 10.
2. Meningkatnya perluasan akses dan mutu serta pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan indikator :
  - 2.1 Persentase Puskesmas yang terakreditasi paripurna kondisi awal Tahun 2020 sebesar 65 Target Tahun 2026 sebesar 97.
  - 2.2 Persentase RS yang terakreditasi paripurna kondisi awal Tahun 2020 sebesar 80 Tahun 2026 sebesar 97.
3. Menurunnya angka kesakitan.
  - 3.1 Eliminasi Malaria kondisi awal Tahun 2020 sebesar 80 Tahun 2026 sebesar 97.
  - 3.2 Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV kondisi awal Tahun 2020 sebesar 90 Target Tahun 2026 sebesar 94.
  - 3.3 Persentase keberhasilan pengobatan TB kondisi awal Tahun 2020 sebesar 94 Target Tahun 2026 sebesar 100.
  - 3.4 Jumlah kasus Penanganan Covid-19 kondisi awal Tahun 2020 sebesar 3.803 Target Tahun 2026 sebesar 100.

**1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan yang Mempengaruhi Pencapaian Substansi Pokok Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026**

Telaah terhadap dokumen renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 ditujukan agar tercipta keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan pada renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

Apabila capaian kinerja renstra pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan melebihi sasaran pada renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan

renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan sudah baik secara nasional ataupun antar kabupaten/kota di tingkat provinsi.

Sedangkan jika lebih rendah, artinya, secara organisasi, Dinas Kesehatan Kota Tarakan memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumberdaya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mechanisme pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Hasil telaah terhadap renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan 2019-2024. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi, serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau Kementerian Kesehatan dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga berdasarkan telaahan ini faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam mempengaruhi pencapaian substansi pokok bagi renstra Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebagai berikut:

- a. Kesamaan permasalahan kesehatan dan beberapa capaian program yang masih rendah di tingkat pusat dan provinsi membuat kota Tarakan juga memiliki kontribusi untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Kewenangan yang diberikan kepada Dinas Kesehatan melalui permenkes SPM bidang kesehatan menjadi pendorong bagi kota Tarakan untuk menyusun kerangka pendanaan yang kolaboratif dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dari berbagai program/kegiatan rekrutmen;
- c. Komitmen kementerian kesehatan dalam hal pemenuhan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas saat ini menjadi pendorong bagi kota Tarakan untuk memenuhi status akreditasi seluruh Puskesmas;
- d. Komitmen Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara untuk penyediaan obat dan peralatan kesehatan

saat ini telah dimanfaatkan dengan baik oleh Puskesmas dan Labkesda Tarakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada pasien dan masyarakat.

- e. Adanya kewajiban tingkat Provinsi untuk memenuhi SPM bidang kesehatan menjadi dukungan bagi kota Tarakan dalam penanggulangan permasalahan surveilans penyakit ataupun kejadian krisis kesehatan yang terjadi di Kota Tarakan.
- f. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan informasi terkait pelayanan kesehatan akan memudahkan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan cepat dan informasi kesehatan yang cukup dan akurat.
- g. Fleksibilitas pemanfaatan dana JKN akan memudahkan Puskesmas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dengan cepat. Dan Puskesmas BLUD (Puskesmas Karang Rejo, Puskesmas Gunung Lingkas, Puskesmas Sebengkok, Puskesmas Mamburungan, Puskesmas Juata dan RSUKT).

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat yang juga dapat mempengaruhi pencapaian renstra bagi Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

- a. Tidak dikelolanya data dan informasi yang dilaksanakan melalui kegiatan PIS-PK membuat kota Tarakan tidak mendapatkan data perbandingan yang memadai untuk dijadikan dasar bagi puskesmas dan dinas kesehatan dalam menyusun kebijakan kesehatan;
- b. Kontribusi dan pemahaman masyarakat Tarakan yang minim membuat beberapa program UKM tidak mampu mendorong pencapaian target seperti indikator SPM, cakupan PHBS, cakupan IDL, ataupun cakupan kelurahan UCI yang masih rendah;
- c. Dukungan pendanaan program/kegiatan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan melalui APBD yang minim (persentase masih kecil dibandingkan amanat undang-undang kesehatan) akan membuat pelayanan UKM dan UKP di Puskesmas tidak dapat terlaksana dengan maksimal;
- d. Tidak tersedianya stok obat, perbekalan kesehatan, dan pelaksanaan monitoring dan kalibrasi alat kesehatan yang terjadwal dan cukup di Puskesmas dan Labkesda untuk memenuhi kebutuhan pelayanan akan



- menjadi faktor penghambat bagi pencapaian kinerja di tingkat nasional dan provinsi Kalimantan Utara;
- e. Tidak tersedianya sarana, prasarana, dan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi di Puskesmas dan Labkesda sesuai standar akan menjadi faktor penghambat tidak terlaksananya pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu;
  - f. Terjadinya Pandemi sehingga membutuhkan Sumber Daya dan Anggaran yang cukup besar, sehingga dilakukan refocusing anggaran dan ketenagaan dalam upaya pengendalian Pandemi Covid 19.

## **C. TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 2025-2026**

### **1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan**

Arah kebijakan pembangunan manusia di bidang kesehatan terfokus pada upaya peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; yang artinya arah dan strategi RPJMN bidang kesehatan 2020 - 2024 adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Untuk menjamin mutu pelayanan bidang kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Terdapat beberapa penekanan kepada pemerintah daerah dalam peraturan menteri kesehatan ini.

Penekanan itu diantaranya adalah kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Kewajiban bagi pemerintah kota Tarakan ini wajib tertuang menjadi capaian kinerja pemerintah kota dengan target 100 % dari masing-masing indikator. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan lampiran permenkes ini yang menyebutkan bahwa SPM bidang kesehatan menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga negara. Sehingga pemerintah kota Tarakan harus

memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM. Termasuk dalam hal pemenuhan sumber daya manusia kesehatan di level Puskesmas. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu penyesuaian tujuan dan Sararan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 – 2026. Tujuan dari RPD Kota Tarakan Tahun 2025–2026 adalah pada tujuan ke 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat dengan indikator Angka Harapan hidup dan Prevalensi Stunting. Dan tujuan ke 3 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien serta Berdaya Saing dengan indikator Nilai RB, dengan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dengan indikator Nilai Sakip dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pada tabel di bawah ini rincian indikator dan target SPM Kesehatan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

Tujuan dari Dinas Kesehatan merupakan implementasi dari misi yang termuat di dalam dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk 2 (dua) tahun ke depan yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai atau direalisasikan sedangkan Sasaran adalah turunan dari suatu tujuan yang menjelaskan lebih rinci dan lebih spesifik serta dapat diukur dengan satuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

Berangkat dari tujuan, sasaran, dan indikator yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan di atas, kemudian ditetapkan Tujuan Perangkat Daerah, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, serta Indikator Sasaran sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Tahun 2025**  
**Dinas Kesehatan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal (Tahun 2023)	TARGET KINERJA / TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-	
					2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	127/100.000 Kelahiran Hidup	41/100.000 Kelahiran Hidup	41/100.000 Kelahiran Hidup
			Angka Kematian Bayi	7/1000 Kelahiran Hidup	6/1000 Kelahiran Hidup	6/1000 Kelahiran Hidup
			Prevalensi Stunting	4,5%	5%	5%
			Indeks Keluarga sehat	0,43	0,8	0,8
			Persentase UHC	99,51%	99%	99%
2.	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola perangkat Daerah Dinas Kesehatan	1.Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,3	86,3	86,6
		2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai / Predikat SAKIP	84/A	85/A	86/A

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN**

#### **TAHUN 2025**

##### **A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025. Renja ini disusun berpedoman pada Rencana Kerja Daerah Kota Tarakan tahun 2025. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 di susun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja ini memuat tujuan dan sasaran, Program dan Kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta tujuan dan Sasaran Janga Menengah Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana Kerja merupakan acuan dari setiap perangkat daerah dalam mengoperasikan program dan kegiatan. Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran merencanakan 5 (Lima) Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi , Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Dari program tersebut di atas diimplikasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Peningkatan Pelayanan BLUD

**2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi
- d. Penertiban Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.

**4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**

- a. Pemberian Izin Apotek, Toko obat, Toko Alat Kesehatan dan optikal, Usaha Mikro obat Tradisional (UMOT)
- b. Penertiban Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga.
- c. Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk Makanan dan Minuman industri Rumah Tangga.

**5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dari uraian tersebut di atas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Kesehatan dalam lampiran tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2025**

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Pembahasan PJ (Rankhir)			
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD
(1)					(2)	(6)	(7)	(8)	(12)
1.					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Dinas Kesehatan
1.2.					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	500%	167.905.057.443	Dinas Kesehatan
1.2.01.					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	131.570.695.158	Dinas Kesehatan
1.2.01.	2.01.				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	11 Dokumen	11.000.000	Dinas Kesehatan
1.2.01.	2.01.	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2.000.000	Dinas Kesehatan
1.2.01.	2.01.	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2.000.000	RSUKT
1.2.01.	2.01.	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.000.000	Dinas Kesehatan
1.2.01.	2.01.	08			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	Dinas Kesehatan
1.2.01.	2.02.				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	9 Layanan	59.388.157.140	Dinas Kesehatan
1.2.01.	2.02.	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 orang/bulan	35.623.563.759	Dinas Kesehatan
1.2.01.	2.02.	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 orang/ bulan	12.911.017.781	RSUKT
1.2.01.	2.02.	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3.867.700.000	Dinas Kesehatan
1.2.01.	2.02.	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6.985.875.600	RSUKT

1	2.01.	2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	7 Layanan	185.100.000	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.05.	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	6.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.05.	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	600 Paket	179.100.000	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.05.	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (RSUKT)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	98 Paket	-	RSUKT
1	2.01.	2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	8 Layanan	324.091.230	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.06.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.992.140	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.06.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	153.221.090	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.06.	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	44.994.000	Dinas Kesehatan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	99.884.000	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	103 unit	604.104.788	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.07.	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.07.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	298.000.008	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.07.	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	106 Unit	306.104.780	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	7 Layanan	1.297.570.000	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.08.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	610.000.000	Dinas Kesehatan

1	2.01.	2.08.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 petugas	677.570.000	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	356 Unit	1.620.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 unit	10.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.09.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	300.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 unit	60.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.09.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.09.	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	750.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.01.	2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	85	1.680.000.000	PKM Gunung Lingkas
1	2.01.	2.10.	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gunung Lingkas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit Kerja	1.680.000.000	PKM Gunung Lingkas
1	2.01.	2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Karang Rejo	85	4.464.600.000	PKM Karang Rejo
1	2.01.	2.10.	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Karang Rejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit Kerja	4.464.600.000	PKM Karang Rejo
1	2.01.	2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juata	85	1.825.600.000	PKM Juata
1	2.01.	2.10.	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Juata	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit Kerja	1.825.600.000	PKM Juata
1	2.01.	2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Sebengkok	85	1.437.000.000	PKM Sebengkok
1	2.01.	2.10.	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sebengkok	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit Kerja	1.437.000.000	PKM Sebengkok
1	2.01.	2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Mamburungan	85	1.312.800.000	PKM Mamburungan
1	2.01.	2.10.	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Mamburungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit Kerja	1.312.800.000	PKM Mamburungan
1	2.01.	2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Pantai Amal	85	572.672.000	PKM Pantai Amal
1	2.01.	2.10.	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pantai Amal	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit Kerja	572.672.000	PKM Pantai Amal



1	2.01.	2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	848.000.000	Labkesda
1	2.01.	2.10.	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Labkesda	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit Kerja	848.000.000	Labkesda
1	2.01.	2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian SPM RS	85	56.000.000.000	RSUKT
1	2.01.	2.10.	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit Kerja	56.000.000.000	RSUKT
1	2.02.	.		<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM</b>	<b>100%</b>	<b>34.037.826.495</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
1	2.02.	2.01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang memiliki fasilitas kesehatan sesuai standar	9 UPT	15.874.566.410	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.01.	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	350.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.01.	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit	-	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.01.	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	0 Unit	-	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.01.	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	5.698.440.000	RSUKT
1	2.02.	2.01.	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10 Unit	1.834.260.200	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.01.	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 Unit	-	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.01.	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0 Unit	-	RSUKT
1	2.02.	2.01.	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0 Unit		Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.01.	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Unit		Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.01.	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit		Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.01.	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	34.250.000	Dinas Kesehatan

1	2.02.	2.01.	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit		RSUKT
1	2.02.	2.01.	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	23 Unit	1.500.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.01.	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	3.750.000.000	RSUKT
1	2.02.	2.01.	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	69 Unit	712.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.01.	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket	1.960.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.01.	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Paket	35.616.210	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan pelayanan kesehatan	9 UPT	17.628.001.225	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5000 Orang	93.709.600	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4800 Orang	70.800.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4700 Bayi	100.200.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11000 Balita	163.049.600	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34000 Anak	156.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48000 Orang	159.981.030	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8000 Orang	110.772.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13000 Orang	61.002.650	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3700 Orang	50.000.000	Dinas Kesehatan

1	2.02.	2.02.	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	400 Orang	49.992.500	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5503 Orang	197.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6838 Orang	61.450.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	75.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah orang yang dilakukan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22307	48.148.398	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah orang yang dilakukan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3500	32.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah sarana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2836	100.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah orang yang dilakukan Pelayanan Promosi Kesehatan	48954	69.344.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokmen	153.998.200	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	800 Orang	-	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	100 Orang	36.995.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	0 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	635.106.800	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	13.683.418.681	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	250 org	74.873.200	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	5 paket	59.150.600	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen	19.476.940	Dinas Kesehatan

1	2.02.	2.02.	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan			Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	500.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	7 Unit	174.253.020	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			RSUKT
1	2.02.	2.02.	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 laporan	34.998.800	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pertemuan Koordinasi Terintegrasi Lintas Program atau dengan Lintas Sektor Kota Puskesmas, Analisis Hasil PISPK, Monev PISPK, Kunjungan Rumah	1000 Kegiatan	104.325.320	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1019	45.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	120 orang	50.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Malaria	960 orang	33.140.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Catin dan Aakseptor aktif yang dilakukan pelayanan kesehatan reproduksi	38638	31.496.998	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.02.	46	Pengelolaan Upaya Kesehatan ibu dan anak	Jumlah ibu dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan	11000	393.317.888	Dinas Kesehatan

1	2.02.	2.02.	59	Penyusunan Kebijakan/ Regulasi Bidang Kesehatan				Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.03.		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah OPD dan UPT yang menerapkan sistem informasi	9 Unit	175.781.860	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.03.	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	8 dokumen	95.193.390	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.03.	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	10.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.03.	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	7 unit	70.588.470	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.04.		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang menerapkan BLUD	100 Persen	359.477.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.04.	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	100.000.000	RSUKT
1	2.02.	2.04.	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	15 Unit	259.477.000	Dinas Kesehatan
1	2.02.	2.04.	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	0 Dokumen	-	RSUKT
1	2.03.	.		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>252.577.530</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
1	2.03.	2.02.		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang terpenuhi kebutuhan SDM sesuai standar	9 UPT	206.366.400	Dinas Kesehatan
1	2.03.	2.02.	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	75 Orang	105.429.400	Dinas Kesehatan
1	2.03.	2.02.	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			RSUKT
1	2.03.	2.02.	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	100.937.000	Dinas Kesehatan
1	2.03.	2.03.		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang memenuhi persyaratan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	8 UPT	46.211.130	Dinas Kesehatan
1	2.03.	2.03.	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	46.211.130	Dinas Kesehatan

1	2.04.	.		<b>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</b>	<b>Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan</b>	<b>100%</b>	<b>70.898.260</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
1	2.04.	2.01.		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	25 Izin	25.054.620	Dinas Kesehatan
1	2.04.	2.01.	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen	25.054.620	Dinas Kesehatan
1	2.04.	2.01.	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	42 sarana	-	Dinas Kesehatan
1	2.04.	2.03.		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan	194 IRTP	9.773.440	Dinas Kesehatan
1	2.04.	2.03.	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3 Dokumen	9.773.440	Dinas Kesehatan
1	2.04.	2.06.		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah pemeriksaan post market dan pengelolaan data perizinan produk makanan dan minuman IRT	96 Sarana	36.070.200	Dinas Kesehatan
1	2.04.	2.06.	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	96 Sarana	36.070.200	Dinas Kesehatan
1	2.05.	.		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>1.973.060.000</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
1	2.05.	2.01.		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.861.060.000	Dinas Kesehatan
1	2.05.	2.01.	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1.861.060.000	Dinas Kesehatan
1	2.05.	2.02.		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Promotif dan Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	5 Kegiatan	81.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.05.	2.02.	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5 Kegiatan	81.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.05.	2.03.		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan dan pelaksanaan UKBM	50 kegiatan	31.000.000	Dinas Kesehatan
1	2.05.	2.03.	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	50 kegiatan	31.000.000	Dinas Kesehatan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2026.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Kesehatan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Kesehatan maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD

Tarakan,

Kepala Dinas Kesehatan



dr. Devi Ika Indriarti., M.Kes  
Pembina Tk I / IVb  
NIP.197005172002122006